

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kemiskinan saat ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat di tuntaskan secara maksimal. Adanya kemiskinan ekstrem di beberapa negara menjadi penyebab dasar dari program yang di prakarsai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membuat sebuah pertemuan pada September 2000 yang di ikuti oleh 189 Negara dengan menyetujui deklarasi yang di kenal dengan sebutan The Milenium Development Goals (MDGS) yang kemudian berlanjut menjadi Sustainable Development Goals (SDGs) (Oktaviana, 2024)

Kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai deprivasi ekonomi tetapi juga dipahami dalam arti yang lebih luas. Levitan (1980) misalnya mendefinisikan kemiskin an sebagai kekurangan barang barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak (Suyanto, 2001). Kemiskinan biasanya ditandai oleh keterbelakangan, ketertinggalan, dan rendahnya produktivitas, sehingga menjadi rendahnya pendapatan (Ahmad, 2022). Hal ini menunjukkan permasalahan kemiskinan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2020-2024 dapat dianggap sebagai persoalan multidimensi (Indonesia, 2020) yang memuat beberapa isi: yang mencakup beberapa hal di antaranya:

1. Kerentanan dan kemungkinan jatuhnya seseorang atau komunitas ke dalam kemiskinan.
2. Berkaitan dengan dihormatinya hak-hak dasar warga negara dan ada tidaknya perbedaan perlakuan terhadap individu atau kelompok dalam kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan juga merupakan pendorong sosial ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pemerataan (Todaro, Smith, 2009) dalam (Endrawati et al., 2023). Teori trickle-down yang dikemukakan oleh Arthur Lewis (1954) dan dikembangkan oleh Ranis dan Fei (1968) menjelaskan bahwa kemajuan yang dicapai masyarakat akan menetes ke bawah, menciptakan lapangan kerja dan lebih banyak peluang ekonomi lainnya. Pertumbuhan ekonomi diikuti dengan aliran vertikal otomatis dari si kaya ke si miskin, sehingga tercipta pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi (Endrawati et al., 2023)

Pengentasan kemiskinan ditentukan oleh tingkat kemampuan yang disertai dengan pemerataan pendapatan bagi setiap kelompok pendapatan, khususnya masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi terjamin di daerah-daerah miskin. Di sisi lain, kemiskinan disebabkan oleh buruknya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdampak

pada rendahnya akses terhadap hal-hal yang menunjang kehidupan yang layak. Terbatasnya akses menyebabkan berkurangnya produktivitas sehingga rendahnya pendapatan (Amartya Sen, 1987) dalam (Endrawati et al., 2023). Rendahnya pendapatan ini merupakan awal dari kemiskinan. Peran pemerintah pusat dan daerah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan upaya jangka panjang untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan dan pembangunan manusia. Pembangunan harus berdimensi spasial, tidak hanya berdasarkan sektor tetapi juga geografi kegiatan ekonomi (Fitri N dan Zakaria J, 2021) dalam (Endrawati et al., 2023)

Menurut (Endrawati et al., 2023) kemiskinan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Sejak tahun 2010 hingga 2017, angka kemiskinan Indonesia cenderung menurun namun tetap di atas 10%. Pada tahun 2018 hingga 2020, angka kemiskinan memasuki era kurang dari 10%. Pandemi Covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 9,78% dan 10,14%. Berbagai kebijakan terkait kemiskinan pada masa Covid-19 diterapkan pada tahun 2022 dengan angka sebesar 9,54%. Namun pencapaian tersebut masih jauh tertinggal dari target RPJMN sebesar 7 hingga 6,5% pada periode 2020-2024.

Indonesia adalah negara yang masih berusaha keluar dari kemiskinan. Meski Indonesia tidak masuk dalam daftar negara termiskin di dunia, namun angka kemiskinannya masih berfluktuasi

setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah gagal menyelesaikan masalah ini. Tujuan pembangunan nasional Indonesia berdasarkan UUD 1945, khususnya meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kondisi bagi individu dan keluarga terpenuhinya seluruh kebutuhan pokoknya, baik yang bersifat material maupun intangible, sehingga individu dan keluarga dapat hidup stabil dan berkembang agar mereka dapat menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya.

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2023), jumlah penduduk miskin di Kota Parepare pada Maret 2023 berjumlah sekitar 7,98 ribu jiwa atau 5,34% dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2023 mengalami penurunan sebesar 0,07 poin persentase dibandingkan dengan kondisi pada bulan Maret 2022, jumlah penduduk miskin pada tahun tersebut sebanyak 8.010 jiwa atau sebesar 5,41%. Dibandingkan sepuluh tahun terakhir, yaitu pada tahun 2014 hingga tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kota Parepare mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Ada kalanya masih mengalami peningkatan seperti pada bulan Maret 2015, Maret 2017, Maret 2020, dan Maret 2022. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin mencapai 8,41 ribu jiwa dan cenderung menurun secara bertahap sejak tahun 2015 dari tahun ke tahun hingga Maret 2023.

miskin setara dengan 7,98 ribu orang. Hal serupa juga terjadi pada tingkat kemiskinan Kota Parepare selama sepuluh tahun terakhir.

Pada tahun 2014, angka kemiskinan penduduk Parepare mencapai 5,88%, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 6,08%. Pada tahun 2016, angka kemiskinan di Parepare turun menjadi 5,73 persen dan terus menurun hingga mencapai 5,26 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020, proporsi penduduk miskin meningkat menjadi 5,44%, pada tahun 2021 menurun menjadi 5,40%, dan pada tahun 2022, proporsi penduduk miskin di Kota Parepare meningkat menjadi 5,41%, dan pada tahun 2023 proporsinya menurun diharapkan itu.

Proporsi penduduk miskin sebesar 5,34%. Angka kemiskinan mengalami fluktuasi dalam 10 tahun terakhir, namun di Kota Parepare angka kemiskinan cenderung menurun dalam 10 tahun terakhir. Derajat kemiskinan suatu daerah dapat mewakili tingkat keberhasilan pencapaian pembangunan daerah tersebut. Dengan menurunkan angka kemiskinan maka pembangunan daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan jalan menuju masyarakat adil dan makmur mudah tercapai.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah ketimpangan pendapatan. Berbagai upaya yang mengarah pada pemerataan pendapatan akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Ukuran ketimpangan ekonomi yang umum digunakan adalah rasio Gini. Di sisi lain, penduduk dengan pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik, dan

perekonomian yang mapan menjadi landasan pengentasan kemiskinan. Ukuran tingkat kualitas sumber daya manusia suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan penulis di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai ***“Pengaruh Gini Rasio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Kota Parepare”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Gini Rasio terhadap Kemiskinan di Kota Parepare?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Kota Parepare?
3. Apa dampak simultan Gini Rasio dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh Gini Ratio terhadap Kemiskinan di Kota Parepare.
2. Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap Kemiskinan di kota Parepare.
3. Menganalisis pengaruh simultan Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Kota Parepare

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian.

1. Keunggulan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan untuk mendukung penelitian mengenai rasio Gini, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan di kota Parepare.
- b. Hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang memiliki variabel penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan akademis dan sebagai referensi literatur bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Parepare khususnya untuk mata kuliah Ekonomi Pembangunan.
- b. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan untuk memperluas pengetahuan peneliti tentang rasio Gini, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan di Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kemiskinan

a. Defenisi Kemiskinan

Kemiskinan mengacu pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk yang pendapatannya di bawah standar yang disyaratkan dianggap miskin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemiskinan mengacu pada keadaan dimana sebagian penduduk atau masyarakat hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan yang mutlak diperlukan untuk mempertahankan taraf hidup minimum.

Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai seseorang yang hidup tanpa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang memadai. Dalam beberapa kasus, kemiskinan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk aset dan rendahnya pendapatan, tetapi juga dapat dilihat dari kualitas hidup, seperti kesehatan, tingkat pendidikan, dan keadilan hukum yang ada. Garis kemiskinan ini mencerminkan pendapatan minimum yang

dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang atau keluarga.

b. Teori Kemiskinan

Menurut (Febriana, 2010), ada banyak teori yang membahas mengenai kemiskinan, namun untuk menyederhanakannya terdapat dua paradigma atau teori besar mengenai kemiskinan. yaitu paradigma neoliberal dan sosial demokrasi. Kedua paradigma teoritis ini sangat penting dalam analisis dan perumusan kebijakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan.

1) Teori neoliberal: Para ahli seperti Shannon, Spicker, Cheyne, O'Brien, dan Belgrave menyimpulkan bahwa kemiskinan dapat dikurangi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Para ekonom ini memandang kemiskinan sebagai masalah yang bersifat sisa atau bersifat sementara dan saling berkaitan. Namun, jika permasalahan kemiskinan tidak dapat diatasi, maka peran negara tetap penting. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai program kebijakan sendiri untuk mengurangi kemiskinan daerah, misalnya dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin.

2) Teori Sosial Demokrat:

Berbeda dengan teori neoliberal, teori sosial demokrat memandang kemiskinan sebagai masalah struktural. Teori ini menekankan bahwa kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan dan hambatan dalam mengakses pelayanan publik. Dari perspektif ini, pemerintah diharapkan mengeluarkan sumber daya untuk menyediakan akses terhadap layanan sosial bagi masyarakat dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengeluaran pemerintah untuk mencapai akses terhadap layanan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

c. Jenis-Jenis Kemiskinan

Jenis-jenis kemiskinan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk (Suryawati, 2005)

- 1) Kemiskinan Absolut: Kemiskinan absolut diartikan ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan memenuhi kebutuhan dasar seperti Makanan, pakaian, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja.
- 2) Kemiskinan Relatif: Kemiskinan relatif diakibatkan oleh dampak kebijakan pembangunan yang tidak merata di

masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan pendapatan.

- 3) Kemiskinan Budaya: Kemiskinan budaya berkaitan dengan sikap dan perilaku individu atau masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor budaya, seperti keengganan untuk meningkatkan taraf hidup, kemalasan, pemborosan, dan kurangnya kreativitas, bahkan dengan bantuan, dari luar.
- 4) Kemiskinan Struktural: Kemiskinan struktural adalah situasi kurangnya akses terhadap sumber daya yang diakibatkan oleh sistem sosial budaya dan politik yang tidak mendukung upaya pengentasan kemiskinan, namun seringkali memperkuat dan mempertahankan kondisi kemiskinan.

d. Indeks Kemiskinan.

Indeks Kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengukur tingkat kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Dalam pendekatan ini, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan non-makanan, berapa pun pengeluarannya.

Pendekatan ini lebih fokus pada kemampuan individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan menggambarkan keadaan di mana mereka tidak mampu mencapai taraf hidup minimum yang dianggap memadai.

Untuk mengukur proporsi kemiskinan perlu menggunakan sumber data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan menggunakan konsep Head Index (HCI-P0), yaitu proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2017).

Rumus perhitungan:

$$P_a = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$$

Dimana:

$\alpha = 0, P_0$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk. .

e. Faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor Penyebab Kemiskinan Ada banyak sekali. Menurut (Itang,2015) dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kemiskinan banyak sekali, yaitu:

1) Tingkat pendidikan yang rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan dapat mengakibatkan terbatasnya keterampilan yang diperlukan seseorang untuk hidup. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan

seseorang dapat menghambat kemampuannya untuk berpartisipasi dalam dunia kerja.

2) Kurangnya motivasi kerja.

Sikap malas yang mengarah pada perilaku pasif atau cenderung menyerah begitu saja pada nasib, dapat menjadikan seseorang menjadi lesu dan kehilangan semangat dalam bekerja.

3) Sumber daya alam terbatas.

Suatu masyarakat akan jatuh miskin jika sumber daya alam tidak lagi memberikan manfaat bagi kehidupan. Seringkali orang mengatakan bahwa masyarakat yang miskin disebabkan oleh lemahnya sumber daya alam.

4) Terbatasnya kesempatan kerja.

Terbatasnya kesempatan kerja akan menimbulkan kemiskinan bagi masyarakat. Idealnya, seseorang dapat menciptakan lapangan kerja baru, padahal kenyataannya hal ini sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena terbatasnya modal dan keterampilan.

5) Batas modal.

Kemiskinan seseorang dapat disebabkan oleh kurangnya modal untuk memperoleh alat dan bahan yang diperlukan untuk menerapkan keterampilan yang dimilikinya untuk tujuan menghasilkan pendapatan.

6) Beban keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak, apabila tidak diimbangi dengan upaya peningkatan pendapatan, dapat jatuh miskin karena jumlah tanggungan bertambah. Semakin besar jumlah anggota keluarga maka semakin besar pula kebutuhan atau beban hidup yang harus dipenuhi dan apabila pendapatan tidak meningkat secara proporsional maka hal ini dapat mengakibatkan sulitnya memenuhi kebutuhan dasar, termasuk dapat berujung pada kemiskinan.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sebelum tahun 1970, pembangunan semata-mata dipandang hanya sebagai fenomena ekonomi saja. Secara perlahan konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pembangunan yang hanya terfokus pada ekonomi saja. Konsep pembangunan manusia tidak hanya memperhitungkan aspek pendapatan, tetapi juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. (bps.go.id, 2020)

Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* pada tahun 1990 melalui laporan yang berjudul

Human Development Report (HDR). Dalam laporannya UNDP menjelaskan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan hanya input dari pembangunan. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, hidup sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, 1990) dalam (bps.go.id, 2020)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komparatif dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang layak di semua negara. Menurut (bps.go.id, 2020), IPM menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan melalui pencapaian pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Dari sudut pandang United Nations Development Program (UNDP), pembangunan manusia dipahami sebagai memperluas pilihan masyarakat (*expanding people's choice*), yang dapat dilihat sebagai suatu proses mencoba memperluas pilihan serta tingkat yang dicapai melalui upaya-upaya tersebut.

Pada saat yang sama, pembangunan manusia juga dapat dianggap sebagai pengembangan kapasitas manusia melalui peningkatan tingkat kesehatan, pengetahuan, keterampilan serta penggunaan kapasitas/keterampilan tersebut. Konsep pembangunan di atas mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep pertumbuhan ekonomi yang hanya menekankan pada peningkatan kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat atau pembangunan sumber daya manusia.

Konsep pembangunan manusia UNDP mencakup empat elemen: produktivitas, pemerataan pembangunan dalam kaitannya dengan populasi (orang), untuk populasi (untuk orang) dan menurut populasi (oleh orang) (Faqihudin, 2010) dimana:

- 1) Pengenalan kependudukan (dari rakyat), yaitu pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui investasi di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.
- 2) Bagi masyarakat, pemberdayaan dapat dilakukan melalui program-program yang menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan berusaha (dengan mengembangkan kegiatan ekonomi di suatu daerah).

- 3) Berdasarkan jumlah penduduk (*by the people*), adalah pemberdayaan rakyat, yang dapat meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaannya melalui peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang politik dan dalam pembangunan.

Pembangunan manusia adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pilihan yang tersedia bagi masyarakat. Di antara banyaknya pilihan tersebut, yang terpenting adalah panjang umur dan sehat, memiliki pengetahuan dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak. IPM sendiri sering digunakan untuk menentukan apakah suatu negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks dikembangkan pada tahun 1990 oleh peraih Nobel ekonom India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq dari Pakistan dan didukung oleh Gustav Ranis dari Universitas Yale dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu telah digunakan oleh Amerika Serikat (Widagdo, 2018).

Program Pembangunan PBB dalam laporan HDI tahunannya. Digambarkan oleh Amartya Sen sebagai

“tindakan vulgar” karena keterbatasannya. Indeks ini lebih berfokus pada faktor-faktor sensitif dan lebih berguna dibandingkan pendapatan per kapita sederhana yang digunakan saat ini, dan juga berguna sebagai pintu gerbang bagi para peneliti yang serius untuk mengeksplorasi faktor-faktor tersebut secara lebih rinci ketika melaporkan pembangunan manusia.

Untuk mengetahui kualitas pembangunan manusia yang dicapai suatu daerah dapat dilakukan dengan mengukur kualitas pembangunan dengan menggunakan 3 (tiga) parameter komponen, antara lain:

- 1) Manfaat kesehatan diukur mulai dari kemampuan fisik untuk hidup, antara lain: penampilan umur panjang;
- 2) Kemampuan mencerminkan keberhasilan pembangunan pendidikan dengan memeriksa angka melek huruf dan lama bersekolah;
- 3) Jumlah barang dan jasa yang dapat diberikan suatu masyarakat kepada warganya, terutama jika mempertimbangkan daya beli masyarakat yang setara.

Dengan kata lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat diukur dalam tiga dimensi, yaitu:

- 1) Indeks Kesehatan
- 2) Pendidikan

3) Ekonomi

Indeks Kesehatan Kesehatan Kesehatan diukur berdasarkan umur panjang dan harapan hidup anak yang baru lahir secara keseluruhan. Indikator pendidikan dapat diukur dari angka melek huruf. Kemudian arah perekonomian diukur dari indeks kekuatan daya beli masyarakat.

Menurut (Arafat et al., 2020) Setelah mengetahui IPM, maka perlu ditentukan kriteria analisisnya, yaitu:

Status Rendah	: $IPM < 50$
Status Menengah Bawah	: $50 < IPM < 66$
Status Menengah Atas	: $66 < IPM < 80$
Status Tinggi	: $IPM > 80$

UNDP (*United Nations Development Program*) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses memperluas pilihan masyarakat. Dalam konsep ini, kependudukan dianggap sebagai tujuan akhir, sedangkan upaya pembangunan dianggap sebagai sarana (sarana utama) untuk mencapai tujuan tersebut.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat elemen kunci harus diperhatikan: produktivitas, kesetaraan, keberlanjutan dan pemberdayaan. Ringkasnya

menurut (Wicaksono, 2020.) keempat poin utama ini memuat prinsip-prinsip berikut:

- 1) Produktivitas masyarakat harus diberdayakan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses perolehan pendapatan dan penghidupan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.
- 2) Keadilan Masyarakat harus mempunyai kesempatan, kesempatan yang sama dalam mengakses seluruh sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang mengurangi akses ini harus dihilangkan sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada dan terlibat dalam kegiatan produktif yang meningkatkan kualitas hidup mereka.
- 3) Keberlanjutan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial tidak hanya terjamin bagi generasi mendatang. Segala sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbarui.
- 4) Pemberdayaan masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang akan menentukan arah kehidupan mereka, serta berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari proses pembangunan.

Sebagai bagian dari upaya menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UNDP mensponsori sebuah proyek pada tahun 1989 yang dilaksanakan oleh Economics and Development Group. Tim ini membangun kompetensi inti yang mencakup tiga kemampuan dasar: umur panjang, pengetahuan, dan daya beli. Angka harapan hidup diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, yang juga dikenal sebagai Angka Harapan Hidup (AHH). Pengetahuan diukur berdasarkan kemampuan membaca, menulis, dan melek huruf, serta rata-rata lama sekolah. Daya beli diukur dalam kaitannya dengan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan sejauh mana negara atau wilayah tersebut telah mencapai tujuan tertentu. Ini mencakup angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali, serta tingkat pengeluaran dan konsumsi yang mencapai taraf hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah dengan angka 100, semakin dekat pula wilayah tersebut dengan jalur pembangunan manusia yang sukses.

Meskipun IPM hanya mencakup tiga komponen, kita harus melihatnya sebagai penyederhanaan dari realitas kompleks dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, landasan inti Indeks Pembangunan Manusia (HDI) perlu dilengkapi dengan

penelitian dan analisis yang mengungkap aspek-aspek lain yang sama pentingnya, seperti harga diri karena politik, kelestarian lingkungan, dan keadilan antargenerasi.

IPM merupakan alat ukur yang sangat berguna untuk memahami perubahan yang terjadi, terutama pada komponen daya beli. Di Indonesia, daya beli mengalami penurunan yang signifikan akibat krisis ekonomi. Sejak pertengahan tahun 1997, krisis ekonomi dan mata uang telah memengaruhi tingkat pendapatan, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan (PHK), dan berdampak pada tingginya tingkat inflasi pada tahun 1997-1998. Menurunnya kesempatan kerja dalam konteks pembangunan manusia menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan alat ukur yang dapat mencerminkan keadaan pembangunan manusia. Sejak tahun 1990, Program Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) telah menggunakan HDI untuk mengukur upaya suatu negara dalam mencapai pembangunan manusia dan menerbitkan indeks ini dalam Laporan Pembangunan Manusia (HDR) tahunannya.

IPM merupakan indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar dan dijadikan indikator, yaitu 1) sektor kesehatan; umur panjang (logativitas); 2) bidang pendidikan: pengetahuan; dan 3) sektor ekonomi; standar hidup yang layak (decent life) (Sanggелorang et al., 2015).

1) Umur Panjang:

Pembangunan manusia, atau upaya untuk meningkatkan pilihan yang tersedia bagi masyarakat, harus bekerja lebih keras agar masyarakat dapat mencapai umur panjang dan sehat. Sebenarnya ada banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur angka harapan hidup, namun mengingat ketersediaan data global maka dipilihlah indeks rata-rata harapan hidup yang dapat dilambangkan dengan “e”

Angka kematian bayi (AKB) tidak digunakan untuk tujuan ini karena indikator ini dianggap tidak terlalu sensitif bagi negara-negara industri. Seperti halnya AKB, EO sebenarnya mencerminkan seluruh tingkat pembangunan, tidak hanya sektor kesehatan.

Di negara yang tidak mempunyai sistem pencatatan sipil yang baik seperti Indonesia, EO dihitung dengan menggunakan metode tidak langsung. Metode ini

menggunakan dua tipe data dasar: data rata-rata jumlah anak lahir hidup dan data rata-rata jumlah anak lahir hidup. Sebagai catatan, EO yang diperoleh dengan metode tersebut tidak langsung mengacu pada keadaan 3-4 tahun setelah tahun survei. Sampai saat ini, ada tiga jenis data yang dapat digunakan untuk memperoleh kedua jenis data dasar tersebut, yaitu sensus penduduk (SP), sensus antar sensus (Supas), dan sensus ekonomi masyarakat nasional (Susenas).

Jangka waktu SP dan Supas adalah 10 tahun, sedangkan jangka waktunya tahunan. Perlu diingat bahwa perhitungan EO tingkat kabupaten/kota dari sumber data ini (khususnya Susenas) harus selalu dievaluasi secara cermat sebelum digunakan.

2) Pengetahuan:

Selain umur panjang, pengetahuan secara luas diakui sebagai elemen fundamental pembangunan manusia. Dengan tersedianya data, pengetahuan diukur dengan menggunakan dua indikator, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Sebagaimana dicatat oleh UNDP dalam publikasi HDR tahunannya, sejak tahun 1995 indeks ini telah menggantikan rata-rata lama bersekolah dengan lama

bersekolah di sekolah dasar, sekolah menengah dan universitas, meskipun hanya angka kedua yang dianggap sebagai indikator dampak yang kurang relevan.

Alternatif ini diakui karena sulitnya memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global, kesulitan yang dapat diatasi untuk keperluan internal Indonesia melalui ketersediaan data Susenas Kor.

Indeks angka melek huruf dapat diperoleh dari variabel-variabel yang berkaitan dengan keterampilan membaca dan menulis. Pemrosesan dapat dilakukan dengan menjumlahkan case yang berkode 1 (bisa membaca dan menulis) dan berkode 2 (bisa membaca dan menulis huruf lain) dan membandingkannya dengan jumlah total case.

Seperti halnya angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dihitung dari pengolahan data penandaan Susenas Kor. Penghitungan dilakukan secara simultan dengan menggunakan data variabel yaitu: jenjang/nilai yang sedang/dihadiri dan jenjang pendidikan tertinggi yang dicapai. Penghitungan rata-rata kehadiran sekolah dilakukan secara bertahap. Pertama, lama bersekolah setiap individu dihitung dari hubungan antar variabel tersebut. Langkah

selanjutnya adalah menghitung total rata-rata waktu yang dihabiskan di sekolah.

3) Standar hidup yang baik.

Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur faktor ini. Mengingat ketersediaan data internasional, UNDP telah memilih PDB riil per kapita yang disesuaikan sebagai indikator standar hidup yang baik. Berbeda dengan indeks dua komponen IPM lainnya, indeks taraf hidup dianggap sebagai indeks masukan dibandingkan indeks dampak, sehingga sebenarnya kurang relevan sebagai salah satu komponen IPM. Namun UNDP berpendapat bahwa indikator lain yang sesuai tidak tersedia secara global.

Selain itu, dipertahankannya indeks ini juga menjadi alasan bahwa selain usia dan tingkat pendidikan, masih banyak variabel input yang patut dipertimbangkan dalam menghitung IPM. Dilemanya adalah memasukkan beberapa variabel atau indikator akan membuat indikator gabungan menjadi kurang jelas. Oleh karena itu, PDB riil per kapita yang disesuaikan dianggap sebagai proksi terhadap input HDI lainnya.

Untuk keperluan penghitungan IPM suatu provinsi, kabupaten atau kota, data dasar PDB per kapita tidak dapat

digunakan untuk mengukur standar hidup layak karena data tersebut bukan merupakan ukuran data belanja masyarakat yang sensitif (yang menjadi fokus IPM). Sebaliknya, yang digunakan adalah konsumsi riil per kapita, yang telah disesuaikan untuk tujuan yang sama. Sumber data yang digunakan adalah Susenas (Kor dan Modul).

c. Dimensi Indeks Pembangunan Manusia:

Detail Dimensi IPM. Ketiga dimensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (Faqihudin, 2010):

- 1) Angka harapan hidup merupakan indikator yang mengukur umur penduduk suatu wilayah atau negara. Umur panjang bukan sekedar upaya individu, namun upaya sosial untuk memperpanjang umur dengan menggunakan sumber daya yang ada. Dapat dikatakan bahwa seseorang akan berumur panjang jika selalu sehat. Selain itu, jika Anda sakit, segera dapatkan pengobatan untuk mempercepat kesembuhan.
- 2) Angka melek huruf dan lama sekolah merupakan indikator yang mengukur tingkat pendidikan suatu penduduk dengan melihat sejauh mana masyarakat setempat menggunakan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kecerdasan nasional. Indikator literasi ditentukan dari variabel literasi, dan indikator nilai dihitung dari partisipasi sekolah, tingkat

kelas saat ini/masing-masing, dan pendidikan tinggi yang telah diselesaikan.

- 3) Daya beli merupakan indikator yang mengukur daya beli masyarakat suatu daerah atau negara. Melalui penggunaan indikator konsumsi riil yang disesuaikan. Perlu dicatat bahwa UNDP menggunakan indikator PDB per kapita untuk mengukur komponen-komponennya.

Dalam kaitannya dengan pembangunan manusia, tidak hanya memperhatikan ketiga faktor yang dijadikan tolak ukur penentuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun banyak dimensi lain yaitu afek. Derajat Pembangunan Manusia Pembangunan yang tidak dapat diukur, seperti: Moral, spiritual, spiritual, tanggung jawab, dan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh, kita tidak hanya harus terjebak dalam memprioritaskan perbaikan pada tiga dimensi yang menjadi dasar IPM, namun juga meningkatkan kualitas manusia pada dimensi lainnya.

Harapan hidup adalah perkiraan jumlah tahun yang dihabiskan sekelompok organisme tertentu di suatu wilayah tertentu. Angka harapan hidup mencerminkan status kesehatan suatu penduduk yang mampu bertahan hidup atau hidup lebih lama karena kesehatannya yang baik.

Aksara atau literasi dalam arti sempit adalah kemampuan membaca dan menulis. Literasi, sebaliknya, dalam arti luas adalah kemampuan mengidentifikasi, memahami, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan, dan mengolah isi berbagai teks dan informasi di media cetak dan online. Ini juga mencakup kemampuan menggunakan bahasa, menggunakannya untuk memahami apa yang dibaca, mendengar kata-kata, dan mengungkapkan serta menjelaskannya secara tertulis.

Membaca dan menulis dianggap penting karena manusia memerlukan pembelajaran yang terus menerus untuk mencapai tujuannya. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan, menggali dan mengembangkan potensinya, serta bagaimana ia mencapai potensinya secara maksimal. Berpartisipasi secara keseluruhan dalam masyarakat.

Banyak analisis kebijakan menganggap tingkat melek huruf sebagai ukuran paling penting dalam mengukur kapasitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Artinya, mendidik seseorang yang bisa membaca dan menulis jauh lebih murah dibandingkan mendidik seseorang yang buta huruf, dan bahwa orang yang melek huruf umumnya memiliki status sosial-

ekonomi yang lebih tinggi, kesehatan yang lebih baik, dan prospek pekerjaan yang lebih baik mahal.

Argumen para analis kebijakan ini juga berasumsi bahwa melek huruf berarti peluang kerja yang lebih baik dan akses yang lebih luas terhadap pendidikan tinggi. Standar hidup mengacu pada kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat. Biasanya diukur dengan pendapatan riil per kapita, namun beberapa ukuran lain juga dapat digunakan. Contohnya termasuk ketersediaan produk (misalnya jumlah lemari es per 1000 orang) dan indikator kesehatan seperti harapan hidup.

Konsep standar ini dapat dibandingkan dengan kualitas hidup, yang tidak hanya mempertimbangkan standar hidup material, tetapi juga faktor subjektif lainnya, termasuk faktor yang berkontribusi terhadap kehidupan seseorang, seperti hiburan, keamanan, sumber daya budaya, dan lain-lain. Keputusan-keputusan seperti ini memerlukan penggunaan metode penghitungan kesejahteraan yang lebih rumit, yang bisa menjadi kontroversial karena sering kali bersifat eksplosif secara politis.

d. Komponen Pembangunan Manusia

Komponen pembangunan manusia yang dijelaskan oleh United Nations Development Program (UNDP) (1993)

melaporkan perkembangan sumber daya manusia (SDM) dalam ukuran kuantitatif yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun IPM merupakan alat untuk memperkirakan peningkatan SDM yang direncanakan secara berkelanjutan, namun diakui bahwa IPM saja tidak dapat memberikan gambaran ideal mengenai peningkatan SDM (Arrizal, 2022) .

Penanda yang dipilih untuk mengukur aspek IPM adalah:

- 1) Umur Panjang. Umur panjang biasanya diukur dengan apa yang disebut dengan variabel harapan hidup saat lahir, atau angka harapan hidup saat lahir, dan angka kematian bayi per 1.000 penduduk, atau angka kematian bayi.
- 2) Prestasi pendidikan. Faktor ini juga dapat diukur dengan dua indikator: kategori masyarakat atau penduduk yang mampu membaca dan menulis minimal usia 15 tahun (angka melek huruf orang dewasa) dan rata-rata lama sekolah pada masyarakat tersebut atau penduduk pada usia tersebut (rata-rata lama bersekolah) yang berusia 25 tahun atau lebih.
- 3) Akses terhadap sumber daya. Di sisi lain, secara makro, kategori ini dapat diukur dengan PDB riil per kapita dengan menggunakan istilah paritas daya beli dalam dolar AS, ditambah dengan tingkat angkatan kerja.

Seluruh unsur pembangunan manusia secara komprehensif menurut Todaro (2006) dalam (Arrizal, 2022):

1) Kecukupan (Fisik Dasar Manusia):

Kecukupan mengacu pada pemenuhan kebutuhan fisik dasar manusia. Kebutuhan dasar ini, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, layanan sosial, dan rasa aman, sangat krusial. Jika salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan ada hambatan besar dalam mencapai kesejahteraan.

2) Karakter (Dorongan untuk Maju dan Kepercayaan):

Karakter mencakup aspek kehidupan yang baik, termasuk dorongan untuk maju, menghargai diri sendiri, dan merasa bahwa ada sesuatu yang layak diperjuangkan. Semua ini berhubungan dengan kepercayaan dan integritas pribadi.

3) Kemungkinan Menerima Keimanan (Keseimbangan Spiritual dan Materi):

Kemungkinan menerima keimanan mengacu pada kemampuan manusia untuk memiliki sifat umum yang melekat pada perjalanan hidup. Kebebasan dan kesempatan di sini mencerminkan kemampuan untuk mempertahankan tujuan iman tanpa terganggu oleh pengejaran aspek materi kehidupan. Dalam situasi ini, kita tidak hanya memilih, tetapi juga memilih dengan bijaksana.

e. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan komposisi dari tiga jenis indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negara (Arrizal, 2022).

1) Status Kesehatan (Angka Harapan Hidup):

IPM mencakup tiga indikator, dan yang pertama adalah status kesehatan. Status kesehatan diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, yang sebenarnya mencerminkan tingkat kematian bayi.

2) Tingkat Pendidikan:

Komponen kedua adalah pendidikan. Pendekatan ini melibatkan dua indikator: angka melek huruf (dengan bobot dua pertiga) dan rata-rata lama bersekolah (dengan bobot sepertiga).

3) Standardisasi Kehidupan (Pengeluaran per Kapita):

Standardisasi kehidupan juga termasuk dalam IPM. Pengeluaran per kapita tahunan digunakan sebagai indikator untuk mengukur standar hidup.

Rumus umum yang sering digunakan untuk menghitung IPM (Arrizal, 2022) adalah:

$$\text{IPM} = 1/3 (\text{Indeks } x^1 + \text{Indeks } x^2 + \text{Indeks } x^3)$$

Dimana, x^1 adalah Indeks Angka Harapan Hidup, x^2 adalah Indeks Kecukupan Standar Hidup, dan x^3 adalah Indeks Pendidikan.

f. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

1) Penggunaan IPM untuk berbagai tujuan:

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) memiliki berbagai kegunaan, termasuk mengalihkan perhatian dari aspek keuangan ke penekanan pada kinerja manusia. HDI diciptakan sebagai standar dasar untuk memantau peristiwa nasional, bukan hanya tren keuangan.

2) Menyoroti perbedaan antar kelompok:

IPM juga membantu menunjukkan perbedaan antara negara, negara bagian, jenis kelamin, kelompok etnis, dan kelompok sosial ekonomi. Dengan menggarisbawahi kesenjangan ini, perdebatan dan upaya pemecahan masalah dapat terjadi di berbagai negara.

g. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Kemiskinan.

Pembangunan manusia merupakan tujuan utama pembangunan. Dalam lingkaran setan kemiskinan ini, ada tiga faktor utama yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin: pendapatan rendah, kesehatan buruk, dan rendahnya tingkat pendidikan. Dibandingkan dengan masyarakat kaya,

masyarakat miskin menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Dampak dari tidak adanya akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Kesehatan yang buruk mempunyai dampak jangka panjang terhadap kemiskinan, yang berakibat pada kesehatan masyarakat yang lebih buruk dan produktivitas masyarakat yang lebih rendah.

Rendahnya tingkat produktivitas yang terus menerus berdampak pada rendahnya pendapatan, menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan menghalangi individu mengakses peluang pendidikan berkualitas dan mampu membayar layanan kesehatan.

3. Rasio Gini.

a. Pengertian Rasio Gini.

Rasio Gini diterima secara luas sebagai alat untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan relatif antar penduduk suatu negara atau wilayah. Indeks Gini juga dapat digunakan untuk menganalisis secara komparatif distribusi pendapatan relatif antar masyarakat di beberapa negara atau wilayah tertentu dengan asumsi tertentu. Dalam distribusi pendapatan,

Bank Dunia mengukur distribusi pendapatan menjadi tiga kelompok (Sari, 2019):

- 1) Penduduk berpendapatan rendah 40% kelompok penduduk
- 2) Penduduk berpendapatan menengah 40% kelompok
- 3) 20% penduduk kelompok berpendapatan tinggi.

Selain itu, ketimpangan distribusi pendapatan mengakibatkan ketimpangan distribusi pendapatan yang parah, sedang, atau ringan, dan ketimpangan tersebut dapat diukur. Ketimpangan/kesenjangan pendapatan merupakan distribusi pendapatan nasional yang mencerminkan keseragaman atau ketimpangan distribusi hasil pembangunan suatu negara kepada warga negaranya.

Terdapat beberapa jenis kesenjangan yang sering menghambat upaya masyarakat mencapai kesejahteraan, yaitu: kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar sektor, dan kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat.

b. Ukuran Ketimpangan

1) Ukuran Distribusi:

Cara pertama untuk mengukur kesenjangan secara global adalah dengan menjumlahkan bagian pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk miskin. Nilai tersebut selanjutnya dapat diukur dengan memasukkan parameter proporsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk

miskin dan proporsi pendapatan yang diterima oleh 20 persen penduduk kaya (Setiowati, 2023).

- a) Tahap ketimpangan parah dimana 4% penduduk termiskin menerima kurang dari 12% pendapatan nasional.
- b) Tingkat ketimpangan sedang, dimana 40% penduduk termiskin menerima 12-17% pendapatan nasional.
- c) Tingkat ketimpangan yang kecil apabila 40% penduduk miskin menerima lebih dari 17% pendapatan nasional.

2) Kurva Lorenz

Kurva Lorenz awalnya dibuat oleh seorang ahli statistik Amerika bernama Conrad Lorenz. Pada tahun 1905, Conrad Lorenz menggambarkan hubungan antara proporsi kelompok penduduk horizontal dan pendapatan vertikal. Kurva yang dirancang didasarkan pada kombinasi proporsi penduduk dan proporsi pendapatan yang diterima, digambarkan dalam bentuk kurva, dan angka-angka yang digunakan untuk menghitung distribusi ukuran (Arsyad, 1997) dalam (Setiowati, 2023)

3) Indeks Gini

Indeks Gini merupakan teknik perhitungan yang digunakan untuk membandingkan luas antar diagonal, yaitu kurva Lorentz dibagi luas segitiga di bawah diagonal. Indeks

awal berisi angka dari 0 hingga 1. Menurut Todaro dalam (Setiowati, 2023), angka indeks Gini yang mendekati nol berarti ketimpangan rendah, angka indeks Gini yang mendekati 1 berarti ketimpangan yang tinggi.

Setiowati, (2023) mengatakan, tujuan dari indeks Gini adalah untuk membuktikan adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan penduduk secara keseluruhan atau individu dengan pendapatan total. Kriteria data yang diperlukan untuk menghitung indeks Gini adalah:

- a) Jumlah rumah tangga atau penduduk.
- b) rata-rata pengeluaran atau pendapatan rumah tangga; yang dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan levelnya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks Gini menurut (Setiowati, 2023) adalah:

$$G = \sum_{i=1}^k \left(\frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{1000} \right)$$

Keterangan

G = Indeks Gini

P_i = Presentase rumah tangga pada golongan ke-i

Q_i = Presentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas

–i

Q_{i-1} = Presentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas $-i$

k = Banyaknya golongan pendapatan

Nilai indeks gini beralih antaranya 0 dan 1, jika:

$G < 0,3$ = ketimpangan rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang

$G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

Kesetaraan penuh dengan semua penduduk yang memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, indeks Gini bernilai 1 berarti terdapat ketimpangan sempurna.

c. Penyebab Gini Rasio

Menurut ahli Alderman dan Morris, penyebab ketimpangan ekonomi menemukan delapan aspek yang mempengaruhi ketimpangan: (Hadi et al., 2018) dalam (Setiowati, 2023)

- 1) Akibat pertumbuhan penduduk yang pesat maka pendapatan per kapita akan menurun .
- 2) Terjadi inflasi. Dengan kata lain pendapatan meningkat, namun produksi barang tidak meningkat.
- 3) Karena lebih banyak modal yang diinvestasikan dalam proyek-proyek padat aset, proporsi pendapatan aset dari aset tambahan cenderung lebih tinggi daripada proporsi pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan, sehingga meningkatkan pengangguran.

- 4) Ketimpangan pembangunan antar wilayah.
- 5) Kurangnya gerakan sosial.
- 6) Untuk melindungi perusahaan-perusahaan kelompok kapitalis, semakin banyak penerapan kebijakan industri substitusi impor yang mempengaruhi harga produk industri.
- 7) Permintaan barang ekspor setiap negara semakin kaku yang berdampak pada memburuknya nilai tukar negara berkembang dalam perdagangan dengan negara maju.
- 8) Populasi industri kerajinan seperti industri rumah tangga, pertukangan kayu, kerajinan serat alam, kerajinan logam, dan lain-lain berkurang drastis.

B. Penelitian Terdahulu

1. (Setiowati, 2023) melakukan penelitian dengan judul “Dampak Rasio Gini, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Terhadap Kemiskinan di Kota Surabaya Tahun 2010 hingga 2019”. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, dan analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio Gini, tingkat pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap angka kemiskinan di Kota Surabaya. Peningkatan rasio Gini, tingkat pengangguran, dan

penurunan HDI berkorelasi dengan peningkatan kemiskinan. Namun jika dianalisis secara parsial, Gini Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan tingkat pengangguran juga tidak berpengaruh signifikan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan. Kesimpulannya, faktor-faktor tersebut secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Surabaya.

2. “Perbandingan Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini, IPM dan jenis kemiskinan menurut pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2017 hingga 2022” yang dilakukan oleh (Endrawati et al., 2023) dengan tujuan adalah untuk:
 - a) memberikan gambaran mengenai perkembangan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, rasio Gini dan IPM di Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
 - b) Menelaah perbandingan jenis kemiskinan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, rasio Gini, dan IPM di Indonesia tahun 2017 hingga 2022.
 - c) Menghitung dampak pertumbuhan ekonomi, rasio Gini, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan menerapkan teknik analisis data deskriptif dan analisis data panel model fixed effect dengan Feasible General Least

Squares (FGLS) dan Cross Section Weighted Factor Estimates (PCSE). Temuan menunjukkan bahwa:

- a) secara umum angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, rasio Gini, dan IPM cenderung membaik pada periode 2017-2022, namun terdapat gangguan pada masa pandemi;
 - b) Pada masa pandemi, hanya tipologi kemiskinan perdesaan dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami transisi kuadran ke pertumbuhan ekonomi rendah.
 - c) Dalam beberapa kasus, pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan rasio Gini mempunyai pengaruh positif yang besar dan HDI mempunyai pengaruh negatif yang besar.
 - d) Sementara itu, pertumbuhan ekonomi, rasio Gini, dan IPM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
3. Kajian (Sukmaraga & Hayati, 2011) “Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, PDB per kapita dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah ”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.
 4. Penelitian yang di lakukan (FITRIANA, 2022) membahas pengaruh upah minimum regional, indeks pembangunan manusia, dan

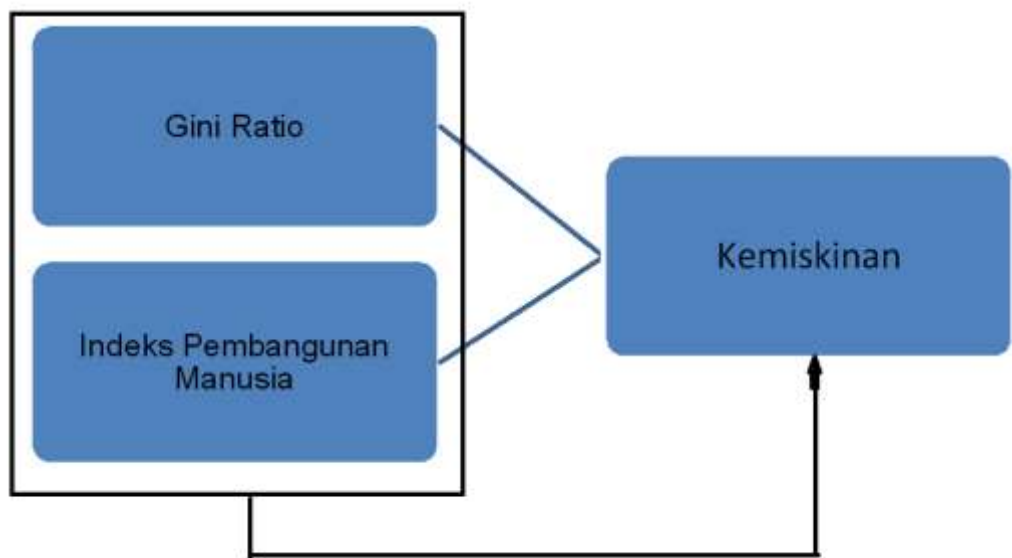
pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak faktor-faktor tersebut terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2015-2020. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan model efek tetap (Fixed Effect Model) sebagai model yang terpilih. Berdasarkan uji simultan, indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum regional (UMR), dan tingkat pengangguran terbuka mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Secara khusus, indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sementara upah minimum regional (UMR) dan tingkat pengangguran terbuka berdampak positif dan signifikan pada jumlah penduduk miskin di 34 provinsi Indonesia pada periode 2017-2021

C. Kerangka Konseptual

Ketika perekonomian berkembang, lapangan kerja tercipta yang mengarah pada peningkatan pendapatan rata-rata penduduk dan pada gilirannya membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Rasio Gini merupakan salah satu indikator ketimpangan pendapatan karena hanya memperhitungkan sebagian penduduk yang berpendapatan tinggi sedangkan sebagian besar penduduk berpendapatan rendah. Hal ini dapat memperparah kemiskinan sehingga menimbulkan ketimpangan, yang tidak dimiliki oleh mayoritas penduduk

berpendapatan rendah adalah akses yang sama terhadap peningkatan sumber daya seperti infrastruktur, sistem pendidikan dan fasilitas kesehatan yang dapat meningkatkan peluang ekonomi.

Gambar 2.1 Kerangka konseptual



D. Hipotesis

Hipotesis sangat penting untuk penelitian yang dimulai dari tahap paling awal penelitian. Hipotesis adalah solusi sementara terhadap suatu pertanyaan penelitian yang dimaksudkan untuk mengarahkan jalur penelitian. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

1. Diduga Gini Ratio berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Parepare.

2. Indeks pembangunan manusia diyakini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kota Parepare.
3. Dihipotesiskan bahwa Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan di Kota Parepare.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini diberi judul “Pengaruh Gini Rantio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Kota Parepare”. Investigasi menggunakan metodologi kuantitatif. Menurut pendapat (Suci Sukmawati et al., 2023) Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan dan anlisis data numerik. Penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk memberikan pola dan gambaran serta rerata, mengetahui pengaruh dari suatu intervensi, mengetahui hubungan sebab akibat, dan menggeneralisir suatu hasil penelitian ke populasi yang lebih besar.

Sedangkan (Sugiyono, 2011) menggambarkan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi positivistis, metode ini digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel. penjelasan data dalam istilah numerik atau statistik yang memungkinkan untuk mengukur hipotesis yang sudah ditetapkan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama kurang lebih 3 bulan yaitu, dari bulan Maret 2024 sampai dengan Mei 2024. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa time series dengan

jangka waktu sepuluh tahun dari tahun 2014-2023 dengan menggunakan metode regresi linier berganda.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Data tersebut berasal dari pusat statistik kota Parepare. dari.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2011) populasi mencakup seluruh subjek/objek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi penelitian ini meliputi seluruh data demografi masyarakat miskin, data Rasio Gini dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kota Parepare yang tercatat di BPS.

2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2011) sampel adalah sebagian kecil dari populasi dalam jumlah dan karakteristik tertentu. Pengambilan sampel harus dilakukan pada sebagian populasi yang mewakili jumlah populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data demografi kemiskinan, data rasio Gini dan data indeks pembangunan manusia periode 2014-2023 di kota Parepare.

D. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengambilan sampel yang disebut purposive sampling. Menurut (Sugiyono, 2011) purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu.

Alasan penggunaan teknik purposive sampling adalah karena tidak semua data tahunan yang tersedia cocok untuk dijadikan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sepuluh tahun terakhir. Oleh karena itu, penulis memilih teknik purposive sampling yang menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

E. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian merujuk pada hal-hal apa pun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga informasi relevan dapat diperoleh dan kesimpulan dapat diambil (Sugiyono, 2011)

1. Variabel Kemiskinan (Y):

Dalam penelitian ini, konsep kemiskinan mengacu pada definisi yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang dimaksud meliputi:

- a. Hak atas pangan yang cukup dan gizi yang memadai.
- b. Hak atas pelayanan kesehatan yang memadai.
- c. Hak atas pendidikan yang layak.
- d. Hak atas tempat tinggal yang layak.
- e. Hak atas pekerjaan yang layak dan penghidupan yang memadai.
- f. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Dalam penelitian ini, ukuran kemiskinan mengacu pada pendapat (Suryawati, 2005). Secara sederhana, ukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat macam pengertian:

- a. Kemiskinan Absolut:

Seseorang termasuk dalam golongan miskin absolut jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

- b. Kemiskinan Relatif:

Seseorang termasuk dalam golongan miskin relatif jika meskipun telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun pendapatannya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan ekonomi masyarakat sekitarnya.

- c. Kemiskinan kultural:

Merujuk pada kondisi kemiskinan yang akarnya terletak pada perilaku dan kebiasaan masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor ini melibatkan ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas

ekonomi karena adanya kecenderungan untuk bermalasan dan kurangnya inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

d. Kemiskinan struktural:

Kemiskinan ini timbul akibat kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan dan berdampak pada masyarakat yang kurang beruntung. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya akses terhadap sumber daya yang ada dalam sistem sosial, budaya, dan politik, sehingga tidak membantu mengurangi kemiskinan.

2. Gini Ratio (X1)

Gini Rasio merupakan alat untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan dalam pembagian pendapatan antar penduduk suatu negara atau wilayah yang telah diakui secara luas. Indeks Gini Ratio, dengan asumsi tertentu, juga dapat digunakan untuk menganalisis perbandingan pembagian pendapatan relatif antar masyarakat dari beberapa negara atau wilayah tertentu.

Koefisien Gini menurut (Statistik, 2022) didasarkan pada kurva Lorenz, yang merupakan kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran Gini Ratio sebagai indikator pemerataan pendapatan memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Ketika Gini Ratio mendekati nol, menunjukkan ketidaksetaraan

yang rendah, sedangkan jika mendekati satu, menunjukkan ketidaksetaraan yang tinggi.

3. Indek Pembangunan Manusia (IPM) (X2)

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan. Ketiga indeks tersebut adalah:

- a. Indeks Harapan Hidup: Mengukur harapan hidup penduduk.
- b. Indeks Pendidikan: Menggambarkan tingkat Pendidikan masyarakat.
- c. Indeks Standar Hidup Layak: Menilai kesejahteraan dan standar hidup yang dapat dicapai.

Secara lebih spesifik, menurut UNDP dalam penelitian (Setiawan & Hakim, 2013) ada empat elemen utama dalam pembangunan manusia:

- a. Produktivitas: Meningkatkan kapasitas individu untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat.
- b. Pemerataan: Mengurangi kesenjangan dan memastikan akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya.
- c. Keberlanjutan: Membangun masa depan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

- d. Pemberdayaan: Memberikan individu dan komunitas alat dan pengetahuan untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan.

F. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis data:

a. Data Kuantitatif:

Data kuantitatif dinyatakan dalam bentuk skala numerik atau angka. Contohnya adalah data yang diangkakan (scoring) dari hasil kuesioner. Dalam penelitian ini, jenis data kuantitatif yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder ini berbentuk time series dari tahun 2014 hingga 2023.

b. Data Kualitatif:

Data kualitatif berbentuk kata-kata, kalimat, skema, dan gambar. Contohnya adalah literatur-literatur dan teori-teori yang relevan dengan penelitian. Selain itu, data kualitatif tambahan yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal, skripsi, dokumen dari web, dan buku yang mendukung dan berkaitan dengan topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi:

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada perusahaan atau, dalam konteks ini, pada instansi pemerintah (BPS Kota Parepare).

2. Dokumentasi:

Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dan mencatat data yang tersedia terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan beberapa pengujian dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 29 sebagai alat bantu dalam menganalisis data. Tindakan-tindakan dan tahapan pengujian tersebut antara lain:

1. Analisis Deskriptif:

Menurut Sugiyono (2017), analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

2. Uji Statistik

- a. Uji Asumsi Klasik:

Alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi yang diperlukan

dalam analisis regresi berganda agar memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimate). Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup normalitas, linearitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi (Widarjono, 2022)

b. Analisis Regresi Berganda

Setelah memastikan bahwa asumsi-asumsi klasik terpenuhi, tahap selanjutnya adalah menganalisis data dan menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Karena penelitian ini melibatkan lebih dari satu variabel bebas yang akan diuji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel terikat, maka proses analisis data yang digunakan adalah regresi berganda.

Menurut (Sugiyono, 2011) analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti ketika ingin meramalkan bagaimana keadaan (naik atau turun) variabel dependen (kriterium). Dalam hal ini, dua atau lebih variabel independen berperan sebagai faktor prediktor yang dimanipulasi (dinaikkan atau diturunkan).

Variabel independen dalam penelitian ini mencakup Gini Ratio (X_1) dan Indeks Pembangunan Manusia (X_2), sedangkan variabel dependen adalah Kemiskinan (Y). Persamaan regresi berganda untuk dua prediktor yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

dimana:

Y = Kemiskinan

a = konstanta

b_1, b_2 , = koefisien regresi

X_1 = Gini Ratio

X_2 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

e = Standar eror

e. Uji T

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel Gini Ratio (X_1) dan Indeks Pembangunan Manusia (X_2) secara individual (parsial) terhadap Kemiskinan (Y). Hipotesis diuji dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$.

f. Uji F:

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel Gini Ratio (X_1) dan Indeks Pembangunan Manusia (X_2) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai (Y). Hipotesis diuji dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$.

g. Koefisien Determinasi (R^2):

Menurut (Widarjono, 2022) Koefisien determinasi mengukur sejauh mana model persamaan regresi (variabel independen) dapat menjelaskan variasi variabel terikat.

- 1) Nilai koefisien determinasi berada dalam rentang antara 0 hingga 1.

- 2) Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat terbatas.
- 3) Nilai yang mendekati satu menandakan bahwa variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Parepare

1. Asal Usul Nama Kota Parepare.

Lontara (tulisan tradisional) dari Kerajaan Suppa menyebutkan bahwa sekitar abad ke-14, seorang anak Raja Suppa meninggalkan istana dan pergi ke selatan untuk mendirikan wilayah sendiri di tepian pantai. Kegemarannya memancing membawanya ke wilayah ini. Wilayah tersebut kemudian dikenal sebagai Kerajaan Soreang. Pada abad ke-15, muncul lagi sebuah kerajaan bernama Kerajaan Bacukiki.

Dalam kunjungan persahabatan, Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tonapaalangga (1577-1566), berjalan-jalan dari Kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang terkenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, Raja Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah di wilayah ini. Secara spontan, ia menyebut tempat ini sebagai “Bijiki Ni Pare,” yang berarti “Baik dibuat pelabuhan di kawasan ini.” Sejak saat itu, nama “Parepare” melekat pada kota pelabuhan ini.

2. Sejarah dan Perkembangan Kota Parepare

Pada awal perkembangannya, dataran tinggi yang sekarang dikenal sebagai Kota Parepare dulunya hanyalah semak-semak

belukar yang terhampar dengan lubang-lubang tanah yang agak miring. Semak-semak ini tumbuh secara liar dan tidak teratur, membentang dari utara (Cappa Ujung) hingga ke arah selatan kota. Namun, melalui proses perkembangan sejarah, dataran ini kemudian diberi nama Kota Parepare.

Dalam masa Hindia Belanda, Parepare memiliki posisi strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya. Karena ramai dikunjungi orang-orang, Belanda pertama kali menyebut tempat ini dan menjadikannya kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Parepare menjadi pusat bagi Belanda untuk melebarkan pengaruhnya ke seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Wilayah ini berpusat di Ajatappareng.

Pada masa itu, di Kota Parepare, terdapat seorang Asisten Residen dan seorang Controlur atau Gezag Hebbber yang memimpin pemerintahan Hindia Belanda. Wilayah ini disebut “Afdeling Parepare” dan meliputi beberapa Onder Afdeling (subwilayah), termasuk Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang, Pinrang, dan Parepare sendiri.

Struktur pemerintahan ini berlangsung hingga pecahnya Perang Dunia II, sekitar tahun 1942. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan undang-undang. Pada tahun 1963, status Parepare berubah menjadi Kotamadya, dan setelah keluarnya UU No. 2 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, statusnya menjadi “KOTA.” Tanggal 17 Februari 1960 ditetapkan sebagai hari kelahiran Kotamadya Parepare berdasarkan pelantikan dan pengambilan sumpah Walikotamadya Pertama, H. Andi Mannaungi.

B. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare

1. Informasi Mengenai Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS dikenal sebagai Badan Pusat Statistik dan didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Selanjutnya diundangkan Undang-undang Statistika Nomor 16 Tahun 1997 yang menggantikan kedua undang-undang sebelumnya.

Akibat perubahan peraturan perundang-undangan tersebut, nama Badan Pusat Statistik resmi diubah menjadi Badan Pusat Statistik. BPS berperan penting dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyebaran data statistik di Indonesia.

UU Nomor 16 Tahun 1997 memperkenalkan beberapa muatan baru, antara lain:

a. Jenis Statistik Berdasarkan Tujuan Pemanfaatan:

Jenis statistik dibagi berdasarkan tujuan pemanfaatannya:

- 1) Statistik dasar sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS.

- 2) Statistik sektoral dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- 3) Statistik khusus diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.

b. Pengumuman Hasil Statistik:

Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan memperoleh data yang diperlukan.

- c. Sistem Statistik Nasional: Undang-undang menetapkan perlunya sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien.
- d. Forum Masyarakat Statistik: Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik. Forum ini bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, BPS mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyediakan kebutuhan data :

- a. BPS bertugas menyediakan data kepada pemerintah dan masyarakat umum. Data ini diperoleh melalui sensus dan survei yang dilakukan oleh BPS sendiri, atau sebagai data sekunder

yang dilakukan oleh departemen dan lembaga pemerintah lainnya.

- b. BPS berfungsi untuk menunjang kegiatan statistik pada suatu departemen, lembaga pemerintah, atau lembaga lainnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem statistik nasional yang efektif dan efisien.
- c. BPS mengembangkan dan memajukan standar teknik dan metode statistik. BPS juga menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan statistik.
- d. BPS menjalin kerjasama dengan organisasi internasional dan negara lain untuk mendorong perkembangan statistik Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare Visi, Misi dan Nilai-Nilai Utama:

- a. Visi:

adalah sebagai pionir dalam data statistik yang andal untuk semua

- b. Misi:

- 1) Memperkuat infrastruktur konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk pengelolaan statistik yang efektif dan efisien.
- 2) Mengembangkan ahli statistik yang kompeten dan profesional yang didukung oleh pemanfaatan teknologi

informasi mutakhir untuk lebih mengembangkan statistik di Indonesia.

- 3) Meningkatkan penerapan kriteria klasifikasi universal, konsep dan definisi, pengukuran dan kode etik statistik pada semua administrasi statistik.
- 4) Meningkatkan kualitas layanan informasi statistik bagi seluruh pemangku kepentingan.
- 5) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan statistik pemerintah dan swasta dalam kerangka sistem statistik nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

c. Nilai-nilai Inti

Nilai Inti BPS merupakan landasan kokoh yang menjadi dasar kita membangun jati diri dan menjadi pedoman dalam bertindak setiap pegawai BPS dalam menjalankan tugasnya.

Nilai-nilai inti BPS terdiri atas:

- 1) Profesional
 - a) Kompeten: Memiliki keahlian di bidang tugas yang dilaksanakan
 - b) Efektif: Memberikan hasil maksimal
 - c) Efisien: Produktif dengan sumber daya minimal untuk melakukan apapun tugas
 - d) Inovatif: Terus memperbarui dan meningkatkan melalui proses belajar mandiri yang berkelanjutan.

- e) Sistematis: Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai serangkaian proses kerja dimana pekerjaan yang satu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2) Integritas:

- a) Komitmen: Komitmen yang tinggi terhadap profesi dan organisasi
- b) Disiplin: Melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku
- c) Konsistensi: Ucapan dan tindakan saja
- d) Keterbukaan: Keterbukaan terhadap gagasan Saran, pendapat, masukan dan kritik dari berbagai aspek sangat kami hargai
- e) Penanggung Jawab: Penanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3) Amanah:

- a) Dapat diandalkan: melaksanakan pekerjaan menurut resep yang tidak hanya berdasarkan logika tetapi juga menyentuh aspek mental dan spiritual
- b) Jujur: tanpa menyimpang dari prinsip moral, melaksanakan semua tugas
- c) Integritas: Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari benturan kepentingan (individu, kelompok,

golongan) dan melaksanakan segala tugas dalam perlindungan kehidupan manusia sebagai suatu perbuatan atau amal ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- d) Berkeadilan: menmempatkan segala sesuatu dengan adil dan memberikan hak yang seharusnya.

C. Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Susunan organisasi BPS terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
4. Deputi Bidang Statistik Sosial;
5. Deputi Bidang Statistik Produksi;
6. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
7. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
8. Inspektorat Utama;
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
10. Instansi Vertikal

BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS; menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya; serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain. Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, 5 (lima) Deputi dan Inspektorat Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Sekretariat Utama terdiri dari beberapa Biro, setiap Biro terdiri dari beberapa Bagian dan setiap Bagian terdiri dari beberapa Subbagian. Sekretariat Utama terdiri dari Biro Bina Program, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, dan Biro Umum.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terdiri dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Direktorat Diseminasi Statistik, dan Direktorat Sistim Informasi Statistik.

Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Deputi Bidang Statistik Sosial terdiri dari Direktorat

Statistik Kependudukan & Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi. Deputi Bidang Statistik Produksi terdiri dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan, Direktorat Peternakan, Perikanan & Kehutanan dan Direktorat Statistik Industri.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa. Deputi Bidang Statistik Distribusi & Jasa terdiri dari Direktorat Statistik Harga, Direktorat Statistik Distribusi, dan Direktorat Statistik Keuangan, TI & Pariwisata.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik terdiri dari Direktorat Neraca Produksi, Direktorat Neraca Pengeluaran, dan Direktorat Analisis & Pengembangan Statistik.

Inspektorat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS; Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang mempunyai

tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional.

Instansi Vertikal BPS terdiri dari BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.

BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi. Disamping itu terdapat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) yang pembentukannya berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 163 tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik yang berkedudukan di Jakarta. Struktur organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Statistik didasarkan pada Keputusan Kepala BPS Nomor 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dipimpin oleh seorang Ketua.

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1. Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- a. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
- b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d. Penetapan sistem statistik nasional;
- e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

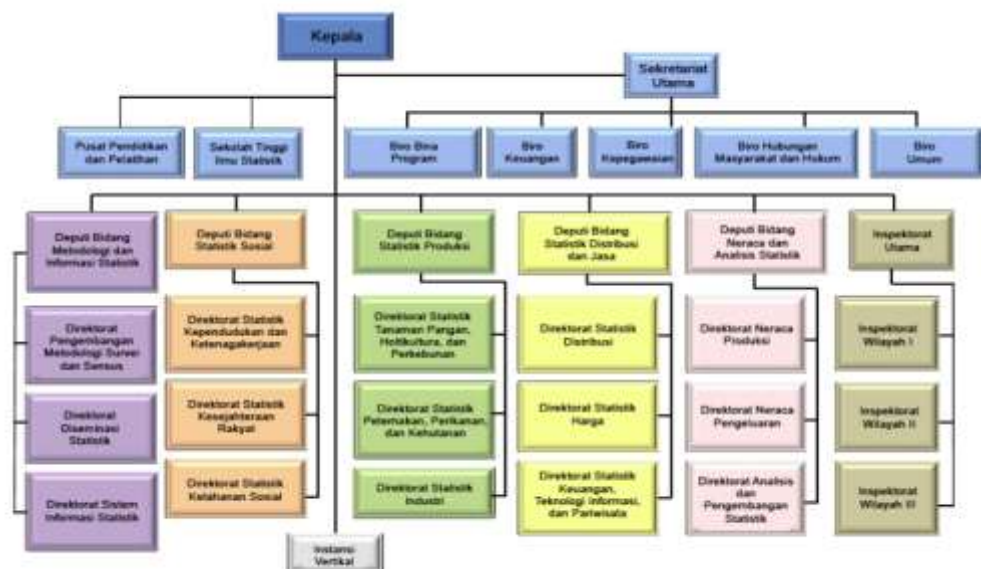
3. Kewenangan

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
- e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu;
 - 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;

- 2) Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare



Sumber: BPS Kota Parepare 2024

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Hasil Penelitian

a. Kemiskinan.

1) Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Parepare

Hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Kota Parepare berjumlah sekitar 7,98 juta jiwa atau 5,34% dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 mengalami penurunan sebesar 0,07 poin dibandingkan Maret 2022, dan jumlah penduduk miskin pada tahun ini sebanyak 8,01 juta orang atau 5,41%.

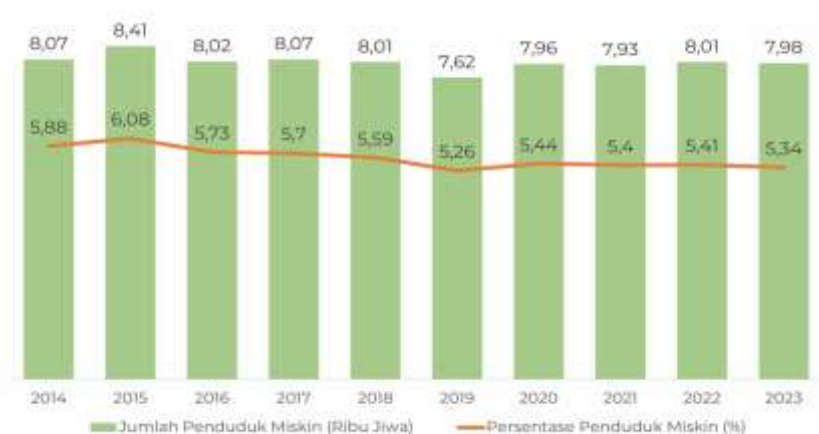
Jika dibandingkan 10 tahun terakhir yaitu tahun 2014 hingga tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kota Parepare mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Penulis melihat peningkatan di beberapa tempat, antara lain Maret 2015, Maret 2017, Maret 2020, dan Maret 2022. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin mencapai 8,41 juta orang dan terus menurun dari tahun ke tahun hingga mencapai angka bulan Maret.

Pada tahun 2023, angka tersebut mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin menurun menjadi 7,98

juta jiwa. Hal serupa juga terjadi pada angka kemiskinan di Kota Parepare selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2014, angka kemiskinan penduduk Parepare mencapai 5,88%, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 6,08%. Pada tahun 2016, angka kemiskinan di Parepare turun menjadi 5,73 persen dan terus menurun hingga mencapai 5,26 persen pada tahun 2019.

Pada tahun 2020, proporsi penduduk miskin meningkat menjadi 5,44 persen, dan pada tahun 2021 menurun menjadi 5,40 persen, dan pada tahun 2022, Proporsi penduduk miskin di Kota Parepare meningkat menjadi 5,41 persen dan pada tahun 2023, proporsi penduduk miskin meningkat. Diperkirakan akan meningkat, jumlah penduduk miskin sebanyak 5,34%.

Gambar 5.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2014–Maret 2023



Sumber: BPS Kota Parepare 2024

2) Perubahan Garis Kemiskinan Kota Parepare

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2023, garis kemiskinan penduduk Kota Parepare mengalami peningkatan.

Pada tahun 2014, garis kemiskinan di Parepare mencapai Rp 256.303 per orang per bulan, meningkat sebesar 5,54 persen menjadi Rp 270.508 per orang per bulan pada tahun 2015. Selain itu, garis kemiskinan penduduk Kota Parepare pun meningkat seiring dengan perubahan tersebut/Kenaikan harga Harga barang dan jasa yang dikonsumsi penduduk Parepare akan mencapai garis kemiskinan sebesar Rp 445.032 per orang per bulan pada tahun 2023.

Tabel 5.1 Garis Kemiskinan Kota Parepare dan Perubahannya, 2014-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Perubahan %
2014	256333	-
2015	270508	5,54
2016	281951	4,23
2017	292685	3,81
2018	308337	5,35
2019	323839	5,03
2020	363710	12,31
2021	383471	5,43
2022	402126	4,86
2023	445032	10,67

Sumber: BPS Kota Parepare 2024

3) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Parepare

Aspek lain dari angka kemiskinan yang perlu diperhatikan selain jumlah dan proporsi penduduk miskin adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks indeks keparahan kemiskinan (P2). Upaya pengentasan kemiskinan harus mampu tidak hanya mengurangi jumlah penduduk miskin, namun juga mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan penduduk.

Kedalaman kemiskinan adalah ukuran perbedaan rata-rata antara pengeluaran setiap penduduk miskin dengan garis kemiskinan, sedangkan tingkat keparahan kemiskinan adalah ukuran kesenjangan pengeluaran di kalangan penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Parepare mengalami perubahan selama periode 2014-2023. Pada tahun 2014 indeks P1 mencapai 1,01, namun pada tahun 2015 menurun menjadi 0,81, dan pada tahun berikutnya indeks P1 sebesar 0,82. Pada tahun 2017, indeks P1 meningkat menjadi 0,85, menurun menjadi 0,75 pada tahun 2018, menurun lagi sebesar 0,71 pada tahun 2019, meningkat menjadi 0,94 pada tahun 2020, dan menurun menjadi 0,72 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, indeks P1

turun menjadi 0,56. Akan naik lagi menjadi 0,58 pada tahun 2023.

Pergerakan angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Parepare menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat miskin di Kota Parepare cenderung bergerak dinamis di sekitar garis kemiskinan dalam kurun waktu 10 tahun. Seperti halnya indeks P1, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Parepare mengalami fluktuasi selama 10 tahun terakhir.

Pada tahun 2014 indeks P2 mencapai 0,28, dan pada tahun 2015 indeks P2 mengalami penurunan menjadi 0,16, namun kemudian terus meningkat hingga mencapai 0,24 pada tahun 2017. Menurun menjadi 0,17 pada tahun 2018, menurun lagi menjadi 0,15 pada tahun 2019, meningkat menjadi 0,24 pada tahun 2020, menurun menjadi 0,13 pada tahun 2021, menurun lagi menjadi 0,09 pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 0,12 pada tahun 2023.

Dengan mempertimbangkan perkembangan angka-angka tersebut dan situasi terkini, jelas terlihat bahwa ketimpangan pengeluaran di kalangan penduduk miskin di Parepare relatif menurun dalam satu dekade terakhir.

Tabel 5.2
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) Kota Parepare, 2014–2023

Tahun	Indeks P1	Indeks P2
2014	1,01	0,28
2015	0,81	0,16
2016	0,82	0,19
2017	0,85	0,24
2018	0,75	0,17
2019	0,71	0,15
2020	0,94	0,24
2021	0,72	0,13
2022	0,56	0,09
2023	0,58	0,12

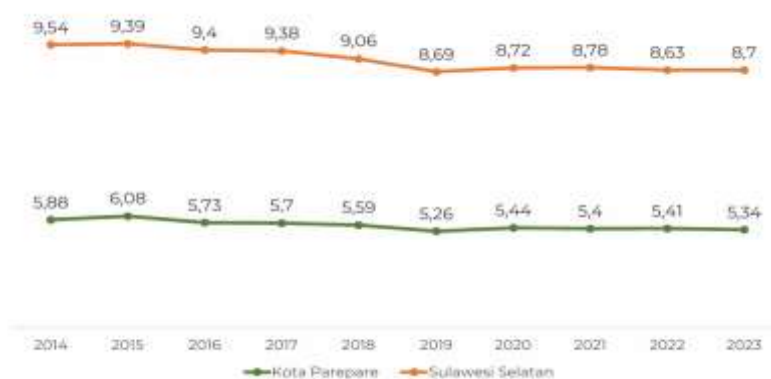
Sumber: BPS Kota Parepare 2024

4) Perbandingan dengan Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan

Derajat kemiskinan suatu daerah dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan di daerah tersebut, khususnya dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dengan menurunkan angka kemiskinan maka pembangunan daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur dapat tercapai dengan mudah dan cepat.

Hasil pengentasan kemiskinan di Kota Parepare semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan angka kemiskinan di Kota Parepare yang semakin menurun dan selalu lebih rendah dibandingkan rata-rata angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. Proporsi penduduk miskin di Kota Parepare pada tahun 2014 sebesar 5,88 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 9,54 persen. Selanjutnya, angka kemiskinan penduduk Kota Parepare berkembang dinamis dalam sepuluh tahun terakhir, mencapai 5,34 persen pada tahun 2023, dan angka kemiskinan pada tahun yang sama masih berada di bawah rata-rata Sulawesi Selatan sebesar 8,70 persen. Di peringkat ketiga ada Kota Parepare yang memiliki angka kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan.

Gambar 5.2
Persentase Penduduk Miskin Kota Parepare
dan Sulawesi Selatan, 2014- 2023



Sumber: BPS Kota Parepare 2024

Hasil proyek pengurangan kesenjangan penduduk miskin di Parepare juga lebih baik dibandingkan rata-rata Sulawesi Selatan. Indeks P1 Kota Parepare diperkirakan mencapai sekitar 0,58 pada tahun 2023, lebih rendah dibandingkan rata-rata indeks P1 Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 1,57 pada tahun yang sama. Demikian pula pencapaian indeks P2 sebesar 0,12 masih lebih rendah dibandingkan indeks P2 Sulawesi Selatan sekitar 0,41 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan kesenjangan kemiskinan di Kota Parepare lebih efektif, terutama dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin yang terjebak dalam jurang kemiskinan di kota tersebut.

Tabel 5.3
Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Parepare
dan Sulawesi Selatan, Maret 2023

Uraian	Parepare	Sulawesi Selatan
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,34	8,7
Indeks P1	0,58	1,57
Indeks P2	0,12	0,41
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	445,032	436,025

Sumber: BPS Kota Parepare

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Parepare

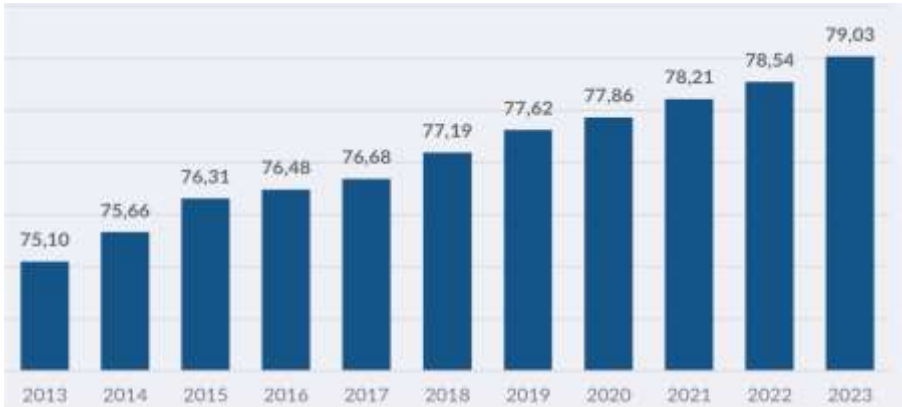
1) Perkembangan IPM Kota Parepare Tahun 2013-2023

Dalam sepuluh tahun terakhir, pembangunan manusia Parepare semakin maju. IPM Parepare meningkat dari 75,10 pada tahun 2013 menjadi 79,03 pada tahun 2023. Pada periode tersebut, IPM Parepare meningkat rata-rata 0,52% per tahun, mempertahankan level “tinggi” sejak tahun 2013. Pada tahun 2023, IPM Kota Pare Pare tercatat sebesar 79,03 atau tumbuh 0,62 persen, lebih cepat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 0,42 persen.

2) Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Kota Parepare

Tingkat keberhasilan IPM tahun 2013-2023 meningkat sebesar 0,49 poin pada tahun 2023, didukung oleh peningkatan pada seluruh komponen. Pencapaian IPM tahun 2023 lebih cepat 0,33 poin pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan IPM selama 10 tahun ditunjukkan pada Gambar 5.3 di bawah ini, dan perubahan komponen-komponennya ditunjukkan pada Tabel 5.4 di halaman berikutnya.

Gambar 5.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Parepare,
Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kota Parepare 2024

Tabel 5.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Parepare
Menurut Komponen, 2013 2023

Komponen	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	70,38	70,39	70,59	70,64	70,69	70,88	71,18	71,27	71,31	71,57	71,78
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,65	14,04	14,44	14,45	14,46	14,47	14,49	14,50	14,51	14,52	14,54
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,89	9,95	10,01	10,02	10,09	10,29	10,30	10,45	10,65	10,66	10,70
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	12.554	12.692	12.817	12.966	13.078	13.303	13.648	13.663	13.786	14.027	14.495
IPM		75,10	75,66	76,31	76,48	76,68	77,19	77,62	77,86	78,21	78,54	79,03

Sumber: BPS Kota Parepare

a) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2013 hingga tahun 2023, UHH bertambah 1,40 tahun. Ini merupakan peningkatan tahunan rata-rata sebesar 0,20 persen. Rata-rata angka harapan hidup saat lahir di Parepare pada tahun 2013 adalah 70,38 tahun dan akan mencapai 71,78 tahun pada tahun 2023. UHH Parepare pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,21 tahun dari tahun 2022 atau mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 0,29% dari tahun 2022.

b) Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator yaitu harapan/ekspektasi lama sekolah (HLS) bagi penduduk usia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah (RLS) bagi penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua metrik ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2023, HLS Kota Parepare mengalami kenaikan sebesar 0,89 tahun, dan RLS meningkat sebesar 0,81 tahun. Pada tahun 2023, HLS diperkirakan tumbuh sebesar 0,14% dan RLS sebesar 0,38%. Pertumbuhan kedua indikator ini lebih

cepat dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 0,07 persen untuk indikator HLS dan 0,09 persen untuk indikator RLS.

c) Dimensi Standar Hidup Layak

Aspek terakhir dari kualitas hidup manusia adalah standar hidup yang layak, yang dinyatakan dalam pengeluaran per kapita yang disesuaikan (dalam harga konstan tahun 2012). Pada tahun 2023, belanja per kapita yang disesuaikan di Kota Parepare mencapai Rp 14,495 juta per tahun, meningkat sebesar 3,34 persen dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2022, belanja per kapita yang disesuaikan diperkirakan mencapai Rp 14,027 miliar per tahun.

3) Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota se-Ajatappareng

Pencapaian pembangunan manusia kabupaten/kota se-Ajatappareng pada tahun 2023 mengalami peningkatan komponen yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan Tabel 5.5, IPM tertinggi terdapat di Kota Parepare (79,03) dan terendah di Kabupaten Baru (72,36).

Tabel 5.5
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Se-Ajatappareng, 2022-2023

Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup (UHH, Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS, Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP, Ribu Rupiah)		IPM		Pertumbuhan IPM, persen
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Barru	69,35	69,55	13,61	13,62	8,25	8,54	11.275	11.712	71,53	72,36	1,16
Sidrap	70,41	70,74	13,01	13,02	8,04	8,20	12.379	12.739	72,06	72,71	0,90
Pinrang	70,15	70,49	13,25	13,27	8,04	8,30	12.102	12.559	71,97	72,84	1,21
Enrekang	71,17	71,34	13,86	13,87	8,93	8,94	11.183	11.636	73,39	73,89	0,68
Parepare	71,57	71,78	14,52	14,54	10,66	10,70	14.027	14.495	78,54	79,03	0,62

Sumber: BPS Kota Parepare

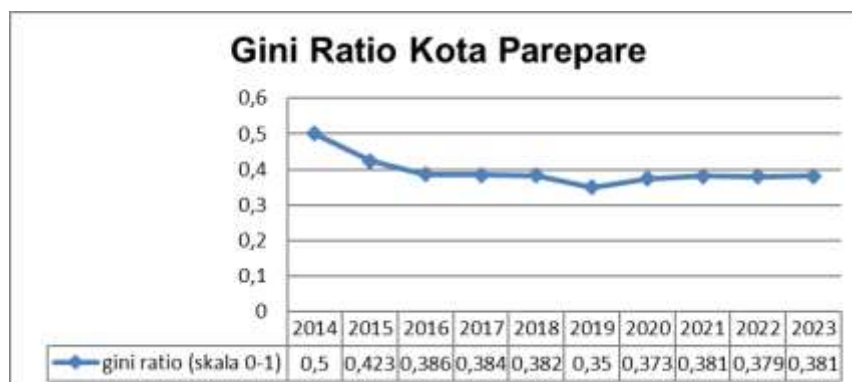
Dilihat dari komponennya yaitu dimensi umur panjang dan umur sehat, maka angka harapan hidup saat lahir berkisar antara 69,55 tahun (Kabupaten Barru) sampai dengan 71,78 tahun (Kota Parepare). Dari segi pengetahuan, harapan lama sekolah antara 13,02 tahun (Kabupaten Sidrap) hingga 14,54 tahun (Kota Parepare), dan rata-rata lama sekolah antara 8,20 tahun (Kabupaten Sidrap) hingga 10,70 tahun (Kota Parepare). Sedangkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan berkisar antara Rp 11,636 juta per tahun (Kabupaten Enrekang) hingga Rp 14,495 juta per tahun (Kota Parepare).

Selain dari kinerja IPM, juga dilihat dari kecepatan dan pertumbuhan IPM. Tercatat Kabupaten Pinrang tumbuh paling cepat sebesar 1,21 persen, disusul Kabupaten Baru dengan pertumbuhan IPM sebesar 1,16 persen. Oleh karena itu, kedua kabupaten ini merupakan wilayah yang pembangunan manusianya mengalami kemajuan pesat dibandingkan kabupaten/kota Ajatappareng. Di sisi lain, Kota Parepare menjadi wilayah dengan pertumbuhan IPM paling lambat yakni sebesar 0,62%, hal ini disebabkan relatif lambatnya pertumbuhan sektor pengetahuan.

c. Gini Ratio Kota Parepare

Rasio Gini sering digunakan sebagai ukuran ketimpangan. Nilai rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1, dengan rasio Gini = 0 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang sama sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan orang lain. Rasio Gini=1 menunjukkan ketimpangan pendapatan sempurna, artinya hanya satu orang atau kelompok yang menerima pendapatan.

Gambar 5.4 Gini Ratio Kota Parepare



Sumber: BPS Sulawesi Selatan 2024

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa Gini Ratio Kota Parepare mengalami fluktuasi pada tahun 2014 hingga tahun 2023. Rasio Gini Kota Parepare sebesar 0,5% pada tahun 2014, menurun menjadi 0,423% pada tahun 2015, namun kembali menurun pada tahun 2016, menjadi 0,386% pada tahun 2017, dan menjadi 0,384% pada tahun 2018. Mencapai 0,382 kemudian turun menjadi 0,35 di 2019. Kemudian pada tahun 2020, nilai tersebut kembali naik menjadi 0,373 seiring dengan penyebaran virus corona dan pemerintah memberlakukan isolasi mandiri serta pembatasan aktivitas di luar rumah. Pada tahun 2021 Rasio Gini kembali naik menjadi 0,381, tahun 2022 sebesar 0,379, dan tahun lalu yaitu tahun 2023 sebesar 0,38.

Secara umum, pada tahun 2016 hingga 2022, rasio Gini Kota Parepare lebih tinggi 0,002 poin dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan. Keadaan ini menunjukkan bahwa

ketimpangan pengeluaran di Provinsi Sulawesi Selatan lebih merata dibandingkan dengan ketimpangan pengeluaran di Kota Parepare. Rasio Gini Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sebesar 0,377, lebih rendah dibandingkan tahun lalu sebesar 0,382.

Gambar 5.5
Perkembangan Gini Ratio Sulawesi Selatan
dan Kota Parepare, 2016– 2022



Sumber: BPS Sulawesi Selatan 2024

Selain rasio Gini, ukuran kesenjangan lainnya yang umum adalah porsi pengeluaran oleh 40 persen penduduk terbawah, yang dikenal sebagai ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran tersebut, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori: Ketimpangan tinggi terjadi ketika porsi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah populasi kurang dari 12 persen, ketimpangan sedang adalah ketika porsinya antara 12 dan 17 persen, dan ketimpangan rendah dibagi menjadi tiga kategori: Ketimpangan jika nilainya lebih besar dari 17%.

Pada tahun 2021, porsi belanja masyarakat Parepare yang termasuk kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,54 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini mengalami penurunan sebesar 18,52% dibandingkan tahun 2020. Di sisi lain, proporsi pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sebesar 17,93% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 17,38%, namun sebaran pengeluaran penduduk Indonesia sebesar 18,06% yang setara dengan proporsi pengeluaran masyarakat kelas bawah kelompok 40 persen. Oleh karena itu, menurut standar Bank Dunia, ketimpangan penduduk di Kota Parepare pada tahun 2021 akan berkurang, dan ketimpangan penduduk di Sulawesi Selatan dan Indonesia pada tahun 2022 juga akan berkurang.

Tabel 5.6

Distribusi Pengeluaran Penduduk Parepare dengan ukuran Bank Dunia, Sulawesi Selatan, dan Indonesia, Maret 2022 (Persentase)

Daerah	Penduduk 40% terbawah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 20% Teratas	Jumlah
Parepare	17,54	39,07	43,38	100
Sulawesi Selatan	17,93	36,95	45,12	100
Indonesia	18,06	35,74	46,2	100

Sumber: BPS Kota Parepare

2. Uji Kualitas Data Penelitian

Dalam penelitian ini, langkah pertama sebelum menguji hipotesis adalah menguji kelayakan data dengan benar. Untuk memeriksa kesesuaian data, terlebih dahulu dilakukan beberapa pengujian, misalnya uji penerimaan klasikal/asumsi klasik. Pengujian ini menggunakan software IBM SPSS 29. Dalam konteks ini, kemiskinan dianggap sebagai variabel terikat (Y), rasio Gini (X1), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai (X2). Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Hasil ujinya adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji data yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal dengan menggunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov dengan alpha 5%. Apabila nilai signifikansi satu sampel uji Kolmogorov-Smirnov $> 0,05$ berarti data dapat dikatakan normal. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Dari hasil uji normalitas satu sampel uji Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 5.7 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,131 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data penelitian model regresi ini mempunyai sebaran data yang normal.

Tabel 5.7 Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,13070607
Most Extreme Differences	Absolute		,233
	Positive		,233
	Negative		-,217
Test Statistic			,233
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,131
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		,125
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,116
		Upper Bound	,133

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 743671174.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016:103) dalam (Hanny & Azis, 2018) mengemukakan bahwa uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal.

Pada penelitian ini nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai toleransi dari hasil keluaran regresi berganda digunakan

untuk menguji apakah terjadi gejala multikolinearitas. Dasar pengambilan keputusan menurut (Hanny & Azis, 2018) adalah:

- 1) Jika nilai VIF > 10,00 dan toleransi < 0,10 maka model regresi tidak mempunyai masalah multikolinearitas.
- 2) Jika nilai VIF < 10,00 dan toleransi > 0,10 maka model regresi tidak mempunyai masalah multikolinearitas.

Uji multikolinearitas regresi berganda menggunakan SPSS. 29 untuk dua variabel independen menunjukkan nilai VIF sebesar $1,782 < 10$ dan nilai tolerance $0,561 > 0,10$. Artinya tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Tabel 5.8 Uji Multikolinearitas Data

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Gini Ratio	,561	1,782	Bebas Multikolinieritas
IPM	,561	1,782	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Output SPSS, diolah 2024

c. Uji heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134) dalam (Hanny & Azis, 2018) Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Penelitian ini memilih uji glejser sebagai metode uji heteroskedastisitas karena uji glejser lebih akurat dengan hasil yang ditampilkan berupa bilangan matematis dan bukan gambar grafik. Uji glejser dilakukan dengan meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:142) dalam (Umar, 2024)

Tabel 5.9
Uji Heterokedaktisistas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,691	3,569		,474	,650
Gini Ratio	,366	1,110	,154	,330	,751
IPM	-,023	,042	-,251	-,537	,608

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Hasil Olah Data 2024

Dari hasil pengujian dengan uji Glejser tabel 5.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variable Gini ratio 0,751

dan variable IPM 0,608 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas pada model regresi penelitian ini.

d. Uji Linearitas

Menurut Priyatno (2010:73) dalam (Wasposito & Minadaniati, 2012), uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Kriteria dalam uji linearitas adalah dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier apabila signifikansi (linearity) kurang dari 0,05. Dasar pengambilan keputusan adalah:

- 1) Jika signifikansi (*Linearity*) $< \alpha$ (0,05), tidak ada hubungan linear antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika signifikansi (*Linearity*) $> \alpha$ (0,05), ada hubungan linear antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 5.10 Uji Linearitas Data (X1)

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kemiskina n * Gini Ratio	Between Groups	(Combined)	,616	8	,077	42,778	,118
		Linearity	,299	1	,299	166,107	,049
		Deviation from Linearity	,317	7	,045	25,160	,152
	Within Groups		,002	1	,002		
	Total		,618	9			

Sumber: Hasil Olah Data 2024

Berdasarkan anova tabel pada tabel 5.10 nilai signifikansi (*Linearity*) ($0,049 < 0,05$) maka kesimpulannya, asumsi linieritas variabel Gini Rasio terhadap variabel Kemiskinan pada model regresi terpenuhi.

Tabel 5.11 Uji Linearitas Data (X2)

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kemiskinan * IPM baru	Between Groups	(Combined)	,474	4	,118	4,116	,076
		Linearity	,374	1	,374	13,000	,015
		Deviation from Linearity	,100	3	,033	1,155	,413
	Within Groups		,144	5	,029		
	Total		,618	9			

Sumber: Olah data 2024

Berdasarkan anova tabel pada tabel 5.11 nilai signifikansi (*Linearity*) ($0,015 < 0,05$) maka kesimpulannya, asumsi linieritas variabel IPM terhadap variabel Kemiskinan pada model regresi terpenuhi.

e. Uji Autokorelasi.

Uji autokorelasi menurut (Ghozali, 2018:111) dalam (Nurfu'adah, 2022) bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya dalam model regresi linier. Model regresi dapat dikatakan baik jika terbebas

dari autokorelasi. Karena, autokorelasi muncul dari adanya observasi yang berurutan selama waktu yang berkaitan.

Cara untuk mendeteksinya adalah dengan uji Durbin Watson (DW kemudian membandingkan hasil uji tersebut dengan tabel DW. Dasar penentuan ada tidaknya autokorelasi menurut (Ghozali, 2018:112) dalam (Nurfu'adah, 2022) adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai dw lebih kecil dari nilai dL atau lebih besar dari nilai (4-dL) maka terdapat autokorelasi.
- 2) Jika nilai dw terletak antara dU dan (4-dU), tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika dw terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Tabel 5.12 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson	
				Sig. F Change	Durbin-Watson
1	,867 ^a	,751	,680	,008	2,222

a. Predictors: (Constant), IPM, Gini Ratio

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Hasil Olah data 2024

Nilai statistik Durbin Watson (D-W) sebesar 2,222.

Tabel D-W menunjukkan dL dan dU masing-masing untuk k = 2 dan n = 10, $\alpha = 0,5$ adalah 0,6972 dan 1,6413. Berarti dU

$< DW < 4-dU$ ($0,6972 < 2,222 < 2,3578$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Gini Ratio (X1) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X2) terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan (Y).

Tabel 5.13 Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17,944	5,169		3,472	,010
Gini Ratio	1,523	1,607	,239	,948	,375
IPM	-,168	,061	-,690	-2,741	,029

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Hasil Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 17,944 + 1,523 X_1 - 0,168 X_2$$

Keterangan:

- 1) Konstanta sebesar 17,944 menunjukkan apabila tidak ada variabel indenden, maka kemiskinan sebesar 17,944.

- 2) Nilai koefisien X1 sebesar 1,523. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa rasio Gini berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Dengan asumsi variabel lain tetap, maka setiap peningkatan 1 rasio Gini maka angka kemiskinan akan meningkat sebesar 1,523.
- 3) Koefisien X2 sebesar -0,168. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dengan asumsi variabel lain tetap, maka setiap kenaikan IPM sebesar 1 akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,168.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji-t parsial dipakai untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent secara parsial atau satu per satu. Membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel ialah salah satu pengujian uji t dengan cara parsial (Gujarati D. N., 2003) dalam (Arrizal, 2022).

Dasar pengambilan keputusan dalam uji T-tes ini menurut (Arrizal, 2022) adalah:

- 1) Jika nilai t-hitung $\leq$ t-tabel atau nilai sig. $\geq \alpha$, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- 2) Jika nilai t-hitung $>$ t-tabel atau nilai sig. $< \alpha$, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Nilai t -hitung diperoleh dari hasil olah data, sedangkan nilai t -tabel diperoleh dari tabel distribusi t dengan nilai $df = n - k$ ($10 - 2 = 8$) dimana n adalah jumlah data (tahun) dan k adalah jumlah variabel bebas yang diuji secara parsial sebanyak 2 dan nilai $\alpha = 0,05$ (uji satu sisi).

Berdasarkan tabel 5.13 menunjukkan :

- 1) Variabel Gini Ratio, nilai t -hitung $> t$ -tabel ($0,948 < 2,306$), dan nilai Sig $0,375 > 0,05$ artinya variabel Gini Ratio pengaruhnya tidak signifikan terhadap variabel Kemiskinan.
- 2) Variabel IPM, nilai t -hitung $> t$ -tabel ($-2,741 > -2,306$), dan nilai Sig $0,029 < 0,05$ artinya variabel IPM pengaruhnya signifikan terhadap variabel Kemiskinan.

c. Uji F Simultan (Uji f)

Uji F, atau (uji secara simultan) dilakukan guna mengetahui apakah seluruh variabel independent yang digunakan oleh penulis, secara bersamaan atau simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependent (GujaratizD. N., 2003) dalam (Arrizal, 2022)

Dasar pengambilan keputusan dalam uji-F ini menurut (Kuncoro. M., 2003) dalam (Arrizal, 2022) adalah:

- 1) Jika nilai F -hitung $< F$ -tabel atau nilai sig. $> \alpha$, maka variabel bebas secara simultan pengaruhnya tidak signifikan

terhadap variabel terikat dan model regresi tidak layak digunakan.

- 2) Jika nilai $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ atau nilai $\text{sig.} < \alpha$, maka variabel bebas secara simultan pengaruhnya signifikan terhadap variabel terikat dan model regresi layak digunakan.

Nilai $F\text{-hitung}$ diperoleh dari hasil olah data regresi berganda pada hasil olah data, sedangkan nilai $F\text{-tabel}$ diperoleh dari tabel distribusi F dengan signifikansi 0,05 berdasarkan nilai numerator $df1 = k-1$ ($3-1=2$) dan nilai numerator $df2 = n-k$ ($10-3=7$) dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel.

Tabel 5.14 Uji F Simultan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	Change Statistics			
				F Change	df1	df2	Sig.F Change
1	,867 ^a	,751	,680	10,563	2	7	,008

a. Predictors: (Constant), IPM, Gini Ratio

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Hasil Olah Data 2024

Berdasarkan hasil analisis data seperti yang di tampilkan pada tabel 5.14, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel bebas secara simultan, pengaruhnya signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal ini dikarenakan $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($10,563 > 4,74$) dan $\text{Sig. } F \text{ hitung} < \alpha$ ($0,008 < 0,05$). Selanjutnya dari hasil

analisis data nilai F-hitung, juga memperlihatkan bahwa model regresi layak digunakan.

B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Gini Ratio (X_1) dan Indeks Pembangunan Manusia (X_2) terhadap Kemiskinan di Kota Parepare, yang hasil uji nya diperoleh melalui metode regresi yang dilakukan. Uji regresi yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sekaligus menjawab hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini.

1. Pengaruh Gini ratio (X_1) Terhadap Kemiskinan (Y) di Kota Parepare.

Pengaruh antara Gini Rasio Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Parepare, berdasarkan hasil perhitungan regresi yang telah dilakukan sebelumnya, koefisien regresi untuk variabel gini rasio menunjukkan tanda yang positif yaitu sebesar 1,523. Hasil uji menunjukkan gini rasio secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Parepare pada taraf signifikansi sebesar 5 persen. Nilai koefisien sebesar 1,523 memiliki arti apabila gini rasio naik sebesar 1 maka akan diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 1,523 persen. Begitu juga sebaliknya, apabila gini rasio turun sebesar 1 maka akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,523 persen, ceteris paribus.

Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini, dimana terdapat pengaruh positif antara rasio gini dengan tingkat kemiskinan di Kota Parepare. Hasil ini sejalan dengan penelitian lain seperti penelitian yang dilakukan oleh (Endrawati et al., 2023), serta (Setiowati, 2023) yang menyimpulkan bahwa rasio gini berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Walaupun pada kasus ini, gini ratio terhadap kemiskinan di Kota Parepare pengaruhnya tidak signifikan karena nilai signifikansinya 0,375 lebih besar dari nilai taraf signifikan penelitian sebesar 5% (0,05) .

Ketika ketimpangan tinggi dalam kelompok masyarakat, terutama antara kelompok yang tergolong miskin dengan masyarakat lainnya, akan menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan. Menyikapi munculnya pandemi virus corona pada tahun 2019 hingga 2021 yang berdampak pada perlambatan perekonomian, pemerintah pusat dan pemerintah Kota Parepare melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketimpangan. Berbagai bantuan sosial diberikan untuk mengatasi penurunan daya beli akibat pandemi.

Selain tindakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat miskin, pemerataan infrastruktur juga berdampak pada pengurangan ketimpangan pendapatan. Kemudahan akses

memudahkan aliran pendapatan antar daerah. Infrastruktur yang tepat memperkuat kapasitas dan peluang masyarakat.

2. Pengaruh Indeks Pembangunan manusia (X_2) Terhadap Kemiskinan (Y) di Kota Parepare.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi sebelumnya, koefisien regresi variabel IPM menunjukkan tanda negatif, yaitu -0,168. Hasil pengujian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kota Parepare dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Nilai koefisien sebesar -0,168 berarti kenaikan IPM sebesar 1 akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,168 poin persentase. Sebaliknya, penurunan IPM sebesar 1 akan meningkatkan angka kemiskinan sebesar 0,168 poin persentase (*ceteris paribus*).

Berdasarkan teori lingkaran setan kemiskinan, berbagai upaya dilakukan untuk memutus seluruh atau sebagian lingkaran setan kemiskinan. Siklus ini mencakup produktivitas dan pendapatan. Penduduk yang berkualitas dan sehat, pendidikan yang memadai, serta kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat miskin membuka peluang peningkatan produktivitas guna memperoleh penghasilan yang layak.

Penelitian (Firmani & Aif, 2021) pada lingkup global tujuh negara OKI, menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan efektif dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tiga

pendekatan penghitungan IPM yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi adalah indikator yang mewakili upaya penurunan tingkat kemiskinan multidimensi. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas potensi sehingga memperluas ruang pilihan dalam berkehidupan yang layak.

Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini, dimana terdapat pengaruh negatif antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tingkat kemiskinan di Kota Parepare. Hasil ini sejalan dengan penelitian lain seperti penelitian yang dilakukan oleh (Endrawati et al., 2023), (Fitriana, 2022), (Arrizal, 2022), serta (Setiowati, 2023) yang menyimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan.

3. Pengaruh Gini Rasio (X_1) dan IPM (X_2) secara simultan Terhadap Kemiskinan (Y) di Kota Parepare.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengujian secara simultan, diperoleh nilai F-hitung lebih besar dibanding dengan nilai F-tabel yaitu $10,563 > 4,74$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,008 < 0,05$ hal tersebut membuktikan bahwa secara simultan, Gini Rasio dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kota Parepare.

Pembuktian tersebut menjelaskan bahwa sebagai permasalahan yang kompleks dan multidimensional, kemiskinan

tidak bisa diselesaikan dari sisi ekonomi semata. Pembangunan ekonomi yang diiringi pemerataan pendapatan dan pembangunan manusia harus berjalan seiring. Merujuk pada penelitian (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018) melalui metode path analysis bahwa tingkat pengangguran memediasi antara pertumbuhan ekonomi dan IPM dengan tingkat kemiskinan. Ketika pembangunan ekonomi meningkat dan terdistribusi merata serta dibarengi peningkatan sumber daya manusia maka upaya penurunan tingkat kemiskinan akan berjalan berkelanjutan.

Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini, dimana secara simultan Gini Rasio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Parepare. Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Darma Endrawati, Syamsu Nujum, Abbas Selong (2023), Nur Fitriana (2022) yang menyimpulkan bahwa secara simultan Gini Rasio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, tentang analisis pengaruh gini rasio, dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Kota Parepare pada tahun 2014 sampai 2023, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan, variabel Gini Rasio, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Parepare. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel gini rasio menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat secara signifikan, maka diikuti dengan penurunan secara signifikan tingkat kemiskinan di Kota Parepare.
2. Secara parsial, variabel Gini rasio berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Parepare, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kota Parepare. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel Gini Rasio mengalami kenaikan, dan Indeks Pembangunan Manusia mengalami penurunan, maka tingkat kemiskinan di Kota Parepare juga akan ikut naik. Kenaikan tingkat Kemiskinan di Kota Parepare

signifikan atau tidak, itu tergantung tingkat signifikansi dari kedua variabel bebas tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Pengaruh Gini Rasio, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Kota Parepare adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan terkait pengentasan kemiskinan perlu dilakukan melalui pedekatan pemerataan pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait kualitas pertumbuhan ekonomi tidak hanya di level nasional, tapi secara spasial menurut provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting untuk memetakan permasalahan kemiskinan sesuai dengan karakteristik dan potensi setiap daerah. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa rasio gini berpengaruh positif dan IPM berpengaruh negatif, menunjukkan perlunya kebijakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan perluasan kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan dan taraf hidup yang layak, untuk mengembangkan kapasitas masyarakat miskin menjadi lebih baik. Secara simultan Gini Rasio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan mengindikasikan bahwa

sinergitas kebijakan pengentasan kemiskinan dibutuhkan untuk menjamin kontinuitas.

2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan rujukan namun tidak berarti harus dijadikan patokan, diperlukan penelitian lanjutan terkait kemiskinan yang melibatkan lebih banyak variabel dengan rentang waktu lebih panjang untuk melihat pengaruh secara lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. (2022). Dampak Kultur Terhadap Lifestyle Masyarakat Nelayan (Analisis Kemiskinan Kultural pada Masyarakat Nelayan). *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 4(1), 1–17.
- Arafat, L., Wiwiek Rindayati, & Sahara. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 7(2), 140–158. <https://doi.org/10.29244/jekp.7.2.2018.140-158>
- Arrizal, L. D. (2022). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014-2021*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Badan Pusat Statistik* (pp. 335–358). <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan Kota parepare maret 2023*. 15. <https://malangkota.bps.go.id/pressrelease/2023/11/06/313/profil-kemiskinan-kota-malang-2023.html>
- bps.go.id. (2020). *2020, Indeks Pembangunan Manusia*.
- Endrawati, D., Nujum, S., & Selong, A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia 2017-2022. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 20144–20151.
- Faqihudin, M. (2010). Human Development Index (HDI) Salah Satu Indikator Yang Populer Untuk Mengukur Kinerja Pembangunan Manusia. *Cermin*, 047, 241331.
- Febriana, E. (2010). *Strategi Untuk Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani Miskin di Perdesaan: Studi Kasus Pada Rumah*

Tangga Petani Miskin di Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. 15–42.

Firmani, I., & Aif, M. T. (2021). Pengaruh Globalisasi Ekonomi, IPM, Dan Populasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Tujuh Negara Anggota OKI. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(1), 8–16.

FITRIANA, N. (2022). PENGARUH UPAH MINIMUM REGIONAL, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA No Title. *Https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/24394/1/Nur%20Fitriana%2C%20160604007%2C%20FEBI%2C%20IE.Pdf*.

Hanny, R., & Azis, A. (2018). Analisis Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Matahari Department Store Cileungsi. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 2(1), 93–110.

Indonesia, P. P. R. (2020). *Perpres-Rencana Pembenagunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*.

Itang, I. (2015). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 16(01), 1–30.

Nurfu'adah, A. (2022). *PENGARUH SUSTAINABILITY REPORT DISCLOSURE TERHADAP FINANCIAL PERFORMANCE*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Oktaviana, S. A. (2024). *Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGS) Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Kemiskinan*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217–240.

Sanggalorang, S. M. M., Rumat, V. A., & Siwu, F. D. J. (2015). Sulawesi Utara. *Http://Www.Sulutprov.Go.Id/Mengenal-Sulut/Sejarah/*, 15(02), 1–11.

- Sari, M. (2019). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Rasio Gini terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh*. UIN AR-RANIRY.
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks pembangunan manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18–26.
- Setiowati, R. (2023). *Pengaruh Gini Rasio, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Kota Surabaya Tahun 2010-2019*.
- Statistik, B. P. (2022). Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2022. *Berita Resmi Statistik*, 52/07, 1–8.
- suci Sukmawati, A., Rusmayadi, G., Amalia, M. M., Hikmah, H., Rumata, N. A., Abdullah, A., Sari, A., Hulu, D., Wikaningtyas, R., & Munizu, M. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Teori dan Penerapan Praktis Analisis Data berbasis Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*, 62, 70.
- Sukmaraga, P., & Hayati, B. (2011). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jmpk*, 08(03), 121–129.
- Suyanto, B. (2001). Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 14(4), 25–42.
- Umar, U. (2024). *Pengaruh Citizen Journalism di Kompasiana Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Covid-19 (Studi Deskriptif Citizen Journalism di Kompasiana. com)*. Universitas Islam Indonesia.
- Waspodo, A. A. W. S., & Minadaniati, L. (2012). Pengaruh kepuasan kerja dan iklim organisasi terhadap organizational citizenship behavior

- (OCB) karyawan pada PT. Trubus Swadaya Depok. *JRMSI-Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 3(1), 1–16.
- Wicaksono, R. A. (n.d.). *Analisis Pengaruh Kemiskinan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta.
- Widagdo, P. B. (2018). Indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia. *Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada*, 1–4.
- Widarjono, A. (2022). *Statistika terapan dengan excel & SPSS*.